



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI  
DENGAN  
MENTERI PERTANIAN**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, SERTA  
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I (satu)
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 14 September 2020
Waktu	: 10.15 s.d 14.45 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020; 2. RKA K/L Tahun 2021; 3. Usulan program-program yang akan dilaksanakan oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI; dan 4. Isu-isu aktual lainnya.
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 45 orang 54 Anggota Komisi IV dengan rincian: <b>1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)</b> 10 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 3. Ir. Mindo Sianipar 4. Ir. Effendi Sianipar 5. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 6. Drs. Imade Urip, M.Si. 7. H. Yadi Srimulyadi 8. H. Sutrisno, S.E., M.Si.

9. Maria Lestari, S.Pd.
10. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

**2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**

7 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Budhy Setiawan
4. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
5. Ir. Ichsan Firdaus
6. Ir. Panggah Susanto, M.M.
7. Alien Mus, S.H.

**3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**

5 dari 8 orang Anggota

1. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
2. Renny Astuti, S.H., S.PN.
3. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
4. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
5. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

**4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**

4 dari 6 orang Anggota

1. H. Sulaeman L. Hamzah
2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
3. H. Charles Meikyansah
4. Julie Sutrisno

**5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**

3 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Ibnu Multazam
2. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.

**6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

**7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**

4 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
4. Johan Rosihan, S.T.

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**

4 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.

2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
3. Fahcry Pahlevi Konggaoasa, S.E.
4. Slamet Ariyadi, S.Psi.

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul, S.Sy.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

**B. Pemerintah:**

1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, M.S., DAA. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
6. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
7. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
8. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
9. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
11. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
12. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);

13. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*;
14. Tri Wahyudi Saleh, Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya
15. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
16. Maryono, Direktur Utama PT Pertani (Persero).

**Jalannya rapat:**

**KETUA RAPAT (SUDIN,S.E.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,  
Yang terhormat Menteri Pertanian beserta jajarannya,  
Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia,  
Yang terhormat Direktur Utama PT Pertani,  
Yang terhormat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri,

Disini saya menerima sepucuk surat dari PT Berdikari yang intinya minta izin tidak bisa hadir karena yang bersangkutan sedang gitu lah. Iya ada telepon saya pagi-pagi diwakili oleh direktur, saya tidak mau karena saya takutnya direkturnya pun pembawa, iya Pak Menteri ya?nanti gagal lagi diwakili, nanti kita kena masalah pula.

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat, rahmat dan hidayahnya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat Sesuai jadwal acara Rapat DPR masa persidangan I Tahun 2020-2021 yang telah diputuskan dalam rangka konsultasi pengganti Bamus tanggal 13 Juli dan Rapat Internal Komisi IV tanggal 24 Agustus 2020 pada hari ini Senin tanggal 14 September 2020 Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri pertanian dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan tahun 2020 dan RKA K/L tahun 2021, usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV serta isu-isu aktual lainnya.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Tata Tertib, rapat hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)**

Rapat Kerja hari ini kita mulai pada pukul 10.15 WIB dan akan diakhiri pada pukul 15.30 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan dengan Pasal 254 ayat 2 Peraturan tata tertib atau atas kesepakatan bersama:

Yang pertama Susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Penjelasan Menteri Pertanian
3. Tanggapan Anggota Komisi IV.
4. Jawaban Menteri.
5. Kesimpulan rapat.

Apakah acara ini dapat setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa tugas komisi dalam bidang anggaran terkait pembahasan rencana Undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib yang menjelaskan bahwa Komisi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran dan program dan kegiatan kementerian lembaga dan hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran secara tertulis. Jadi kalau hari ini masalah ini tidak selesai atau dengan kata lain "*deadlock*" maka tidak ada laporan ke Badan Anggaran karena nanti sore saya jam 16.00 WIB harus memimpin Rapat Kerja lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Besok pagi seharusnya kita tidak ada sidang tetapi karena waktunya mepet, Selasa malam sudah ditunggu oleh Badan Anggaran sedangkan besok kami jam 14.00 WIB akan adakan Rapat Paripurna jam 09.00 WIB ya? iya jam 09.00 WIB.

Saya tidak berharap ini terjadi *deadlock* karena kemarin selama 2 hari kita sudah bahas habis-habisan tetapi kalau nanti ada yang berubah, ada yang berubah ya nanti kita lihat bagaimana akhir rapat ini. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja ini adalah berdasarkan Surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG 007.002/DPRRI/9/2020 tanggal 11 September 2020 hal "Penyampaian jadwal pembahasan rencana Undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2021.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Raker hari ini adalah bagian dari pembahasan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 dan RKA K/L tahun 2021. Secara umum Komisi IV melihat pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang penyerapannya masih di bawah 50% dan juga masih ada, saya tegaskan lagi masih ada program yang numpuk satu dengan lain cuman dengan lihaihnya. Saya tegaskan dengan "lihaihnya" Eselon I melambung kata-katanya kalau ini oh ini, nanti yang ini beda lagi kamu ngomong yang masalah ini, itu saja. Karena itu kemarin saya sudah sampaikan kepada ketahanan pangan ini kita larang tapi ganti lagi judulnya, saya nggak mau karena sebelum menerima bahan rapat ini, kami juga konsultasi dengan orang luar termasuk dengan BPK apakah akan ada potensi temuan? karena kalau sampai ada temuan oleh BPK bukan Eselon I yang tanggung jawab, ini beliau ini menteri ini yang

tanggung jawab, kasihan akibatnya apa? Berarti Komisi IV juga nggak benar bekerjanya, pengawasannya.

Kita mengetahui bahwa dalam sejarah krisis ekonomi apapun sektor pertanian tidak pernah tumbuh negatif dengan pangsa 266 juta penduduk sektor pertanian telah menjaga ruang ekonomi kita, kita harus paham pertumbuhan positif bukan berarti mampu mensejahterakan masyarakat. Dalam situasi krisis pandemi walaupun PDB pertanian tumbuh, kita harus melihat komoditas apa yang mampu tumbuh. Namun fakta di lapangan banyak Petani Hortikultura panen namun tidak mampu menjual sehingga terjual dengan harga murah, dengan kata lain tidak berharga atau bahkan ada yang di buang-buang. Saya mendapat laporannya, saya sangat seharusnya Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian hadir di sana padahal komoditas hortikultura merupakan salah satu yang mampu memberikan nilai tambah hingga 30% jika dikelola dengan baik. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian atas hal tersebut? karena permasalahan yang terjadi di semua sentra produksi Kementerian Pertanian harus membantu petani mendapatkan akses ke pasar tidak perlu ada acara ceremonial yang diperlukan jajaran karantina di lapangan. Jadi Pak Menteri beserta jajarannya mengadakan acara yang kasihan Kepala Badan Karantina di daerah.

Dalam pembahasan RKA K/L 2021 Saudara Menteri telah menyampaikan rencana usulan kegiatan yang kemudian dilakukan pendalaman dan diskusi selama 2 hari dalam Rapat Dengar Pendapat yang lalu. Sebagai Mitra Komisi IV selalu mengingatkan agar Kementerian Pertanian dalam menyusun program dan kegiatan harus fokus berdasarkan skala prioritas, selain itu harus memiliki output yang jelas serta berdampak besar terhadap produksi nasional. Menteri beserta Eselon I jajarannya dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing, seperti yang berulang kali saya katakan bila program tersebut sudah ada temuan BPK jangan diulang kembali.

Berdasarkan pembahasan Rapat Dengar Pendapat yang lalu Komisi IV menilai masih banyak yang kegiatan belum memahami situasi COVID-19 antara lain: kegiatan berorientasi Direktorat Sentris di mana setiap Eselon II terkesan harus punya kegiatan, masih ada kegiatan yang volumenya kecil dan tersebar sehingga dipastikan tidak berdampak secara nasional. Anggaran operasional perjalanan dinas juga masih dirancang sangat besar sekali, belum ada *sense of crisis*. Berdasarkan beberapa yang telah menjadi masukan Komisi IV pada Rapat Dengar Pendapat yang lalu antara lain yaitu melakukan rap formulasi kegiatan di Eselon I Kementerian Pertanian agar lebih fokus dan lebih efisien dalam menyusun kegiatan, selain itu masih ditemukan kegiatan-kegiatan komponen proyeknya sama tetapi seperti yang saya katakan tadi judulnya beda maupun kegiatan yang berpuluh-puluh tahun gagal tetapi tetap dirancang karena mengadakan penunjukkan perencanaan Kementerian Pertanian tidak mampu berinovasi, dengan kata lain "mati kreativitasnya". Kementerian Pertanian harus dibangun adalah angka nasional sehingga semua kegiatan harus dilakukan secara massif dan bervolume besar bukan kegiatan-kegiatan yang kecil hanya membuat sibuk staf saja.

Selain itu beberapa masukan secara spesifik Komisi IV juga mengkritisi antara lain mengenai: belanja operasional, belanja pegawai Badan Litbang. Kita lihat

di Litbang ini pegawainya saja, pegawainya saja gajinya hampir ½ triliun, belum belanja tetap dan belanja lain-lain. Saya berpikir apa yang dihasilkan dengan 1,7 hampir 1,7 triliun, apa yang dihasilkan? saya mau tahu. Oh saya pernah menghasilkan bibit cabe, bibit tomat, terus ayam apalah, kalau 1,7 triliun saya kalau jadi Pemerintah mending saya beli bibit dari luar saja ga usah dari Litbang, ga usah.

Pak Menteri kemarin saya mengatakan sama Kepala Litbang, cukup dua fokus saja; padi dan jagung, kembangkan secara besar, kembangkan secara baik, kembangkan secara mutu yang terbaik. Jadi saya tidak berharap kita beli benih jagung dari pengusaha. Yang mana pengusahanya siapa? asing. Saya enggak berharap seperti itu, berharapnya inovasi. Enggak usah oh ada 30 item tapi sedikit, sedikit, sedikit, sedikit gak usah, apa sih dibutuhkan? Padi, jagung itu saja fokus saja. Pikirkan juga kemarin saya disentil oleh bos saya kalau membuka lokasi *Food Estate* di Kalimantan Tengah, apakah bisa dengan benih yang ada? seharusnya di kembangkan dulu, dicari formulasi benih yang tahan di tingkat keasaman yang tinggi. Nah juga saya bilang TP atau PSP, ada 5,5 juta kilo dolomit untuk *Food Estate* di Kalimantan Tengah, bawanya gimana? berapa kapal? berapa truk itu? di TP juga kemarin tahun 2021 menanam lokasi 70.000 hektar dengan pupuk cair NPK dolomit, saya nggak yakin ada lokasinya 70 hektar yang sekarang.

Terkait BPPSDMP kami masih menilai masih mendapat beberapa kegiatan yang perlu dikaji ulang untuk efektivitasnya dan kami juga mendapatkan penjelasan mengenai dua hal; Polbangtan yang belum terakreditasi sehingga mengakibatkan proses wisuda kelulusan menjadi terkendala, hal ini menjadi penting karena anggaran untuk pendidikan vokasi cukup besar sehingga sangat ironis jika anggaran cukup besar ini tidak disertai dengan kinerja yang baik.

Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi IV antara lain mengenai sejauh mana pelaksanaan anggaran pengembangan bawang putih di Sumatera Utara, yang konon katanya ada 30.000 hektar. Tadi pagi Bupati telepon saya belum saya angkat, kegiatan dan saprodi dan pendamping *Food Estate* di Kalimantan Tengah karena kemarin dijelaskan ada irigasi ini, ini tetapi di Komisi V juga ada nilainya hampir 5 triliun. Hal yang penting lagi adalah pengadaan sapi 1.000 desa kalau ga salah, kalau sapinya dari Pulau Jawa, sapi dari Pulau Jawa dipindahkan ke Kalimantan, dipindahkan ke Sumatera nggak usah ada itu percuma, tidak akan bertambah itu sama saja sapinya transmigrasi. *Mbok* kenapa impor sapi indukan yang bener-bener bagus diperbanyak dulu, baru dibagikan. Iya kalau dari Jawa dipindahkan ke Lampung, dari Jawa pindah ke Kalimantan itu namanya sapinya transmigrasi.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar kami sampaikan, selanjutnya kami persilahkan kepada Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut diatas. Saudara Menteri saya ingatkan, saya mengkritik bukan karena saya tidak suka, saya mengkritik bukan karena saya benci, saya mau Kementerian Pertanian sukses hanya itu saja. Silakan.

**MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

*Alhamdulillah wal syukurillah.*

*Wallahaulawala Quwwata illabilla.*

Yang saya hormati, banggakan Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI, hadirin sekalian yang sama berbahagia.

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita tetap sehat dan berkesempatan hadir di acara Rapat Kerja pada hari ini. Mengawali Rapat Kerja perkenankan saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan Rapat Kerja hari ini Senin, 14 September 2020 dengan agenda:

1. Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020.
2. RKA K/L tahun 2021.
3. Usulan program-pogram yang didanai DAK.
4. Isu-isu aktual yang ada.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang sangat kami hormati.

Pada kesempatan Rapat Kerja hari ini saya beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang telah menyampaikan berbagai saran dan masukan sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja tanggal 23 Agustus 2020 dan laporan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 10 dan 11 September 2020. Saran dan masukan yang konstruktif dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI selama Raker maupun RDP tersebut telah kami coba tindak lanjuti dan menjadikan perbaikan dan penyusunan kembali dari rencana kerja kegiatan dan anggaran Kementerian tahun 2021.

Sebelum memaparkan agenda Rapat Kerja pada hari ini, izinkanlah kami melaporkan perkembangan nilai tukar petani dan ekspor pertanian sampai bulan Agustus 2020. Seperti telah kita ketahui bersama sampai dengan baru waktu tahun 2020 ini sektor pertanian mendapatkan tekanan akibat adanya pandemi COVID-19. Namun demikian dalam 3 bulan ini terlihat fenomena yang menggembirakan terhadap perkembangan sektor pertanian yaitu selain PDB, sektor pertanian juga tumbuh positif ditengah terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua. Nilai Tukar Pertanian (NTP) dan ekspor pertanian menunjukkan kinerja yang juga terus membaik. NTP sejak 2020 terus meningkat dan sesuai rilis data BPS NTP (Nilai tukar pertanian) bulan Agustus 2020 bergerak naik dari atas 100 tepatnya sebesar 100,65 atau naik 0,56% dibandingkan nilai tukar petani bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada bulan



Agustus 2020 mengalami kenaikan 0,31% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal lain yang menggembirakan adalah meningkatnya nilai ekspor pertanian, nilai ekspor pertanian pada bulan Juli 2020 mencapai 35,82 triliun mengalami peningkatan 23,30% dibandingkan bulan sebelumnya Juni 2020 kenaikan ekspor tersebut juga lebih tinggi 14,37% dibandingkan Juli tahun 2019. Total nilai ekspor pertanian selama Januari-Juli 2020 mencapai 225,51 triliun dan mengalami peningkatan 9,52% dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Dalam melihat perkembangan positif dan dari indikator-indikator tersebut memberikan motivasi pada kami di Kementerian Pertanian untuk terus bekerja keras, lebih keras lagi sesuai dengan apa juga yang menjadi harapan dari DPR Komisi IV. Namun demikian dalam menjalankan peran Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, Kementerian Pertanian selalu membuka diri bekerja sama dengan berbagai pihak baik dengan kementerian dan Lembaga Pemerintahan lain maupun non Pemerintahan, lebih khusus lagi dengan lembaga legislatif melalui Komisi IV DPR RI untuk berkonsultasi dan berdiskusi tentang rencana kerja maupun evaluasi terhadap pembangunan pertanian yang telah maupun sedang dilaksanakan, dengan harapan melalui forum konsultasi maupun diskusi Kementerian Pertanian dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih fokus guna mewujudkan kemandirian, penyediaan pangan penduduk, serta menjadikan kesejahteraan petani.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan agenda pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran sampai dengan awal September 2020 dari sisi fisik walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Pelaksanaan kegiatan utama dalam rangka menopang produksi komoditas pangan sampai dengan awal September 2022 telah menunjukkan kemajuan di antaranya :

1. Pengembangan padi telah mencapai 196.933 hektar atau 45,20%.
  - a. Bantuan benih hibrida mencapai 5.395 hektar atau 53,97%.
  - b. Bantuan benih padi hibrida 768.161 hektar atau 37,07% .
  - c. Untuk bantuan benih jagung mencapai 859.446 hektar atau 61,62%.
2. Pengembangan hortikultura utama yaitu kawasan bawang merah mencapai 1.140 hektar atau 38% dan kawasan aneka cabe 2.890 hektar atau 57,80%.
3. Pengembangan komoditas perkebunan yaitu kopi mencapai 3.150 atau 39,09%, kakao 1.990 hektar atau 39,88% dan karet 1.625 hektar atau 39,88%.

Selain itu juga telah terealisasi penyediaan benih tanaman perkebunan sebanyak 53 juta batang atau 60,28%. Untuk mendorong produktivitas ternak telah dihasilkan benih ternak unggul sebanyak 4,5 juta dosis atau 91,12% dari target. Kegiatan lain yang mendukung peningkatan produksi komoditas utama di atas yaitu perbaikan irigasi, pembangunan sumber air, bantuan alsintan, asuransi pertanian penyuluhan pertanian, stabilitas pasokan dan harga pangan dan lainnya. Realisasi fisik telah mencapai di atas 55%.

Berdasarkan realisasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai dengan 11 September 2020 mencapai 8,49 triliun atau 60,43% dari pagu Rp14,05 triliun. Apabila perhitungan *outstanding contract* sebesar Rp1,16 triliun yang diperkirakan akan segera dibayarkan. Maka realisasi anggaran sampai mencapai Rp9,66 Triliun atau di atas 68,75%. Rincian serapan anggaran dari masing-masing Eselon I secara lengkap tersaji pada bahan Raker yang kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang terhormat.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Pertanian pada tahun 2020 ini mendapatkan anggaran belanja tambahan atau ABT sebesar 1,72 triliun yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Dukungan swasembada gula sebesar Rp137,39 miliar.
2. Dukungan antisipasi kekurangan pangan akibat COVID-19 sebesar 1,45 triliun diantaranya :
  - a. Atau *Food Estate* di Kalimantan Tengah seluas dalam rencana 30.000 hektar.
  - b. Perluasan Areal Tanam Baru atau PATB pada padi seluas 250.000 hektar.
  - c. Pengembangan 1.000 desa sapi mulai bantuan sapi pada 5 desa, 5 cluster di 25 Desa sebanyak 5.000 ekor.
  - d. Pengembangan *Food Estate* Hortikultura atau bawang merah, bawang putih dan kentang di Humbang Hasundutan Sumatera Utara.
3. Percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang melalui program kegiatan padat karya, rehabilitasi, jaringan irigasi tersier atau RJIT dan perbaikan jalan usaha tani atau JUT.

Saat ini sedang dilakukan akselarasi pelaksanaan kegiatan yang sudah dimulai pada awal September 2020 sehingga mulai bulan Oktober depan laporan perkembangan realisasi kegiatan dan keuangan mengacu pada anggaran baru sebesar 15,78 triliun sudah dapat kita lakukan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai agenda kedua, kami akan melaporkan rencana anggaran atau RAK Kementerian Pertanian tahun 2021 yang telah disesuaikan berdasarkan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI pada saat Rapat Kerja maupun RDP beberapa hari yang lalu. Dalam melaksanakan RKA tahun 2021 Kementerian Pertanian tetap fokus terhadap pemenuhan pangan, penyediaan bahan baku industri dan ekspor, komoditas utama seperti padi, jagung, bawang merah, aneka cabe dan beberapa komoditas perkebunan serta peternakan telah dipilih untuk didorong baik dalam hal produksi maupun untuk pemenuhan bahan baku industri dan ekspor. Oleh karena memiliki peran penting dalam tiga hal tersebut maka dalam rangka mencapai target program kegiatan pengelolaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Teknik seperti Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Holtikultura, Dirjen Perkebunan dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH.

Pada masing-masing Direktorat Jenderal teknis tersebut telah merumuskan program kegiatan seperti disajikan dalam bahan Raker yang telah disampaikan pada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Dalam rangka mendukung pelaksanaan

program diatas dan berdasarkan masukan pada Rapat Kerja tanggal 27 Agustus 2020 dan RDP tanggal 10-11 September 2020 dari pagu anggaran 2021 sebesar 21,83 triliun telah dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal, pagu anggaran semula Rp1,81 triliun dilakukan pengurangan anggaran sebesar 100 miliar yang selanjutnya dialokasikan untuk penguatan sarana pada Badan Karantina sebesar Rp60 miliar dan penguatan pengawasan pada Inspektorat Jenderal Rp40 miliar sehingga menjadi Rp1,71 triliun.
2. Inspektorat Jendral, pagu anggaran semula 124,58 miliar ditambah 40 miliar untuk penguatan, pengawasan sehingga menjadi Rp 164,58 miliar.
3. Dirjen Tanaman Pangan, pagu anggaran semula 4,82 triliun selanjutnya lakukan pengurangan 15 miliar dari pengurangan dukungan manajemen internal yang dialihkan untuk penguatan perkarantina kemudian ditambah 100 miliar yang diambil dari BKP untuk pengadaan RMU sehingga menjadi Rp4,91 triliun.
4. Dirjen Hortikultura, pagu anggaran semula 1,08 triliun selanjutnya mendapat tambahan 100 miliar dari Badan Litbang Pertanian dan 60 dari Badan PPSDM sehingga pagu anggaran akhir menjadi Rp1,24 triliun, selain itu juga dilakukan refocusing internal untuk sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
5. Dirjen Perkebunan pagu anggaran tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp1,61 triliun namun dilakukan refocus internal untuk sarana prasarana pengelolaan pemasaran hasil perkebunan.
6. Dirjen PKH pagu anggaran awal sebesar 2,08 triliun selanjutnya ditambah 50 miliar dari Badan Litbang Pertanian sehingga pagu akhir menjadi Rp2,13 triliun, selain itu dilakukan refocusing internal untuk menambah bantuan kambing dan domba dan ayam lokal.
7. Dirjen PSP pagu anggaran semula Rp5,26 triliun kemudian dilakukan pengurangan Rp25 miliar rupiah yang diambil dari program dukungan manajemen dialihkan untuk penguatan perkarantina dan dilakukan penambahan sebesar 33,90 miliar dari BKP yang diperuntukkan untuk pembelian *hand sprayer* dan pompa air mendukung P2L sehingga pagu anggaran akhir menjadi Rp5,27 triliun.
8. Balitbangtan, pagu anggaran semula Rp1,73 triliun selanjutnya dikurangi sebesar 100 miliar untuk dialihkan ke Dirjen Hortikultura dan 50 miliar untuk Dirjen PKH sehingga pagu anggaran air menjadi sebesar Rp1,58 triliun, dilakukan relokasi internal untuk revitalisasi dan modernisasi laboratorium penelitian dalam rangka peningkatan kapasitas riset pertanian.
9. BPPSDMP pagu anggaran tetap sebesar 1,39 triliun dan dikurangi sebesar 60 miliar untuk dialihkan ke Dirjen Hortikultura sehingga pagu anggaran air menjadi sebesar Rp1,33 triliun, selain itu juga dilakukan realokasi internal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas program diklat dan vokasi dan pelatihan serta pendampingan sekolah lapang bagi petani.
10. BKP pagu anggaran semula Rp900,90 miliar selanjutnya mengalami pengurangan Rp133,90 miliar yang diambil dari kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa atau LPMDES kemudian dialihkan ke Dirjen TP sebesar 100 miliar dan Dirjen PSP sebesar Rp33 miliar sehingga pagu anggaran Air menjadi 767 miliar. dan

11. Badan Karantina Pertanian dari pagu anggaran awal 1,01 triliun kemudian mendapatkan penambahan anggaran 100 miliar untuk penguatan sarana perkarantinaan insenerator x-ray, biosensor dan alat laboratorium lain sehingga anggaran akhir menjadi Rp1,11 triliun.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Selanjutnya pada agenda ketiga kami laporkan program dan kegiatan yang mendapat dukungan dana alokasi khusus atau DAK tahun 2021, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan pertanian pada tahun 2021 Kementerian Pertanian mendapat DAK fisik sebesar 1,4 triliun sesuai Surat Edaran Perbendaharaan Nomor S-229/PK/2020 dan DAK nonfisik sebesar Rp204 miliar sesuai Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 9/BM.K.07/2020. Dukungan DAK fisik ditunjukkan untuk pembangunan renovasi sarana dan prasarana fisik sebesar pembangunan fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian ketahanan pangan dan meningkatkan komoditas pertanian strategis agar memiliki daya saing baik untuk industri pangan maupun ekspor. DAK non fisik ditujukan bagi peningkatan akses pangan masyarakat, tingkatan kemandirian pangan rumah tangga, penyampaian informasi pertanian melalui pendataan, pelatihan dan pendampingan.

Rincian kegiatan yang didanai di DAK fisik pada tahun 2021 penempatannya dilakukan berdasarkan hasil pembahasan multilateral meeting antara Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan Kementan meliputi:

1. DAK fisik provinsi terdiri:
  - a. Renovasi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya.
  - b. Renovasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya
  - c. Renovasi UPTD Balai pembenihan perkebunan dan sarana pendukungnya.
  - d. Renovasi UPTD Balai pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan dan sarana pendukungnya.
2. DAK nonfisik kabupaten kota terdiri atas:
  - a. Pembangunan Jalan Pertanian.
  - b. Pembangunan sumber-sumber air.
  - c. Renovasi BPP Kecamatan dan sarana pendukungnya.
  - d. Pembangunan lumbung pangan masyarakat di desa rentan rawan pangan.
  - e. Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah sentra produksi.

Selain itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 9/PMK .07/2020 kegiatan yang didanai dari DAK non fisik telah ditetapkan meliputi:

1. Pendampingan latihan pendataan pertanian dan penyuluhan.
2. Pekarangan pangan lestari.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai agenda terakhir, ijinlah kami melaporkan tentang kegiatan *Food Estate* di Kalimantan Tengah sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Presiden kepada Kementerian Pertanian pada saat Rapat Terbatas beberapa bulan yang lalu, khususnya guna mengantisipasi kemungkinan terjadi kekurangan produksi pangan meresponi pernyataan FAO maka Kementerian Pertanian telah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk merencanakan program *Food Estate* tersebut.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, kemudian dilakukan pengkajian oleh Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian atau BBSDLP Balitbantan terdapat potensi lain yang dapat dikembangkan seluas 164.598 hektar pada 2020 ini dilakukan pengolahan lahan melalui intensifikasi pertanian seluas 30.000 hektar dengan harapan dapat menyumbang produksi pangan pada akhir tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 selain melanjutkan pengolahan lahan melalui intensifikasi.

**KETUA RAPAT:**

Saudara Menteri saya tanya sedikit, 30.000 hektar itu ditanam 2020?

**MENTERI PERTANIAN:**

Tidak, total program yang ada 30.000.

**KETUA RAPAT:**

Tapi bukan ditanam tahun 2020?

**MENTERI PERTANIAN:**

Kita masuk 30.000 itu masuk 2020 .

**KETUA RAPAT:**

Bisa tanam 30.000.

**MENTERI PERTANIAN:**

Intensifikasi yang ada itu, jadi meninggalkan dari IP 100 ke IP 200 dan ada yang.

**KETUA RAPAT:**

Nggak yang saya tanyakan, bisa nggak September, Oktober, November, Desember bisa menanam 30.000?

**MENTERI PERTANIAN:**

Saya sih kalau melihat lapangan bapak *insya Allah* karena ini irigasi primer sekunder dan tersier nya sudah ada, tinggal *management in out* dari yang 30.000 itu masih memungkinkan untuk kita capai.

**KETUA RAPAT:**

Setahu saya sekunder dan lain-lain itu baru mulai dikerjakan oleh PUPR.

**MENTERI PERTANIAN:**

Belum, jadi ini sudah ada, Sudah ada. Jadi kondisi irigasi sudah bagus di 30.000.

**KETUA RAPAT:**

Pak saya pernah nengok kesana ya 30.000 itu masih rusak berat setahunnya ya? Januari, Februari saya sudah meninjau kesana rusak berat, masih dalam perbaikan. Makanya tadi saya tanyakan apakah bisa ditanam 30.000 hektar? Pakai apa tanamnya? 30.000 hektar itu banyak loh kalau melibatkan tenaga kerja itu mungkin ya puluhan ribu atau berapa? apakah ada tenaga kerja di sana? sedangkan tenaga kerja di sana itu kan sangat kekurangan, ini loh.

**MENTERI PERTANIAN:**

Izin Ketua dari 164.000 yang dicanangkan itu, yang real yang bisa ditanami 142.000 kurang lebih dan yang mungkin dengan irigasi yang tersedia hanya di sekitar 82.000, yang lain belum ada irigasinya seperti yang Ketua sampaikan. Dari 82.000 itu yang memang sangat layak untuk bisa dimasuki 2020-nya hanya 30.000 dan di sana sudah mulai dilakukan sebenarnya dan lebih banyak pada lahan-lahan yang kita sudah intervensi pada bulan April dan ini masuk pada penanaman intensifikasi di 30.000 itu. Jadi kami sure, kami yakin di 30.000 itu kita bisa masuk memang dengan kerja yang lebih kuat dan irigasi di sana sudah sudah dibenahi. Oleh karena itu 30.000 itu menjadi pilihan dari 80 yang memang bisa layak kita lakukan dan itu sudah disetujui seperti itu, kami coba lakukan.

**KETUA RAPAT:**

Ini bahan Rapat Kerja Komisi V dengan PUPR.

**MENTERI PERTANIAN:**

Disini ini data dari PUPR pak.

**KETUA RAPAT:**

Sama dengan saya punya.

**MENTERI PERTANIAN:**

28.

**KETUA RAPAT:**

Ini data saya kemarin juga sudah saya tampilkan juga.

**MENTERI PERTANIAN:**

28.000 lebih itu sudah irigasi sangat baik bapak, jadi itu yang kami intervensi sekarang.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang saya paham Pak Menteri, bukan saya yang ga paham. Yang saya tanyakan tadi saudara menteri mengatakan akan ditanam 30.000 hektar, mungkin gak dengan SDM-nya? ini yang jadi pertanyaan saya, jangan target setinggi langit pencapaian sekaki bukit. Saya nggak mau targetnya terlalu tinggi tiba-tiba tidak tercapai. Yang namanya nggak bagus siapa? ya Pak Menteri. Iya nanti rakyat tinggal menghujat ke DPR goblok mau aja dibohongin, mau aja dibilang iya, iya, iya bawa begini. Yang saya tanyakan kalau kurang lebih 28.315 hektar kira-kira mampu nggak SDM-nya disana? itu aja tadi yang saya tanyakan dan di sini juga ada perbaikan irigasi. Kemarin mungkin PSP itu apa Dirjen Tanaman Pangan pun mengambil data dari saya setelah saya sajikan. Kemarin-kemarin dia nggak pernah sajikan ini, ada nggak anggota? ga ada disajikan ini setelah saya sajikan ini baru disajikan Dirjen TP itu dan ini perbaikan irigasi ini baru disetujui akan jalan, ya itu 2021 untuk sisa luas fungsional peningkatan irigasi. Ini hasil Raker PUPR dengan Komisi V, maka itu yang saya tanyakan dan saya juga ingin menanyakan juga kalau nggak salah ada ABT untuk *Food Estate* Kalteng nanti tolong dijelaskan, iya Pak Menteri ya? iya lanjutkan.

**MENTERI PERTANIAN:**

*Insha allah* kami akan perhatikan semuanya Komisi IV dan sementara ini kami masih tetap yakin 30.000 itu intervensi kita masih memungkinkan untuk kita masuk, tidak semudah itu dan orangnya ada yang di 30.000 hektar itu orangnya ada pak, ada bekas transmigrasi dan lain-lain sebagiannya. Disana juga udah turut 300 Babinsa, 300 Babinsa yang diperbantukan dan kami menggunakan alat berat di sana termasuk transport dan lain-lain yang sudah tersedia diatas 150 buah diambil dari seluruh Kalimantan Tengah untuk fokus, kami izin melanjutkan.

**KETUA RAPAT:**

Sedikit case Saudara Menteri, setahu saya se Provinsi Kalimantan Tengah itu penduduknya cuma 1 juta lebih sedikit. 1 kabupaten paling banyak 180.000 hektar iya? silakan dicek datanya. Kalau satu hektar membutuhkan 5 orang tenaga kerja, kira-kira tenaga kerjanya berapa? ini banyak sekali tenaga kerjanya. Kita misalnya kerjakan pakai *hand tractor* atau traktor besar, 1 hari paling berapa hektar? nanam

pakai mesin. Nanam pakai mesin tuh kalau nggak pengalaman 6 bulan setahun, yakin nggak bisa karena persemaiannya pun beda harus pakai nampannya, betul Pak Gatot?

**Plt. INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. SUMARDJO GATOT IRIANTO, M.S., DAA.):**

Kalau pakai *transverter* sangat betul, nah ini mungkin Pak Menteri menggunakan tabur pak sistemnya.

**MENTERI PERTANIAN:**

Tabur pakai drone.

**KETUA RAPAT:**

Pernah dicoba nggak pakai sistem tabur?

**MENTERI PERTANIAN:**

Sementara kita coba.

**KETUA RAPAT:**

Pernah dicoba belum? pernah dicoba di wilayah mana saya mau tahu? dan berapa luasan? saya tidak bicara demplot, itu kalau Dirjen TP bicara demplot, wah demplot ini, sawah ini menghasilkan 15 ton. Saya yakin dia demplot tiap hari di tengok airnya, ditengok pupuk tidak boleh berkurang, biarkan semuanya diatur. Saya ini baru denger ya mungkin saya bodoh karena saya enggak pernah sekolah pertanian, menanam padi di tabung. Saya baru dengar hari ini, baru dengar hari ini, besok saya kalau COVID-19 sudah selesai, saya akan belajar ke Vietnam dan Thailand untuk belajar masalah itu tadi.

**Plt. INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Iya izin Pak Menteri, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Dirjen Tanaman Pangan yang bersangkutan atau anda PSP atau TP? Anda urus saja Gatot masalah pemeriksaan yang nggak bener itu.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):**

Izin Pak Sekjen, Pak Pimpinan.

Pola sistem tabur sudah biasa dilakukan baik di Kalteng, Kalsel, sebagian di Sumsel Banyuasin juga pakai tabur pak sehingga penggunaan benih itu 40 sampai



50 kilo perhektar. Kalau Sistem Semih itu atau Jajar Legowo itu cukup 25 kilo perhektar. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Siapa dapilnya Kalsel sama Sumsel? tolong ditinjau apa yang dikatakan dia ini di Kabupaten mana ya? saya enggak mau main-main ini. Ini bukan apa, saya mendukung nggak *Food Estate*? mendukung karena untuk ketahanan pangan nasional, tetapi kalau hanya untuk saya nggak yakin bisa berhasil, jangan-jangan *drone*-nya belum dipakai pun sudah rusak.

Kemarin di kampung saya menteri, Pak Ketua saya lihat di TV, di YouTube wah petani sekarang pakai *drone*. Wah itu canggih, kami minta gini-gini. Eh loe ngurus *hand tractor* aja kagak bisa apalagi mau minta *drone*, nggak ada *drone*-*drone* saya bilang. Ini kalau saya pak, ini dapil saya seperti itu. Saya ngomong apa adanya, iya lanjutkan nanti kita bahas. Saya minta semua penjelasan singkat jelas dan gampang dipahami karena kami jam 16.00 WIB harus ada Rapat Kerja lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### **MENTERI PERTANIAN:**

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati.

Mudah-mudahan seperti apa yang bapak tunjuk, kami akan coba lakukan dan mungkin berkenan mungkin Eselon I kalau ada yang mau melihat langsung karena kami sudah turun kesana. Ada 300 tentara yang dilatih dengan traktor bersama masyarakat yang ada di sana, ada transmigrasi 30.000 itu kemudian sistem tabur melalui *internet of thing* juga dilakukan melalui. Jadi memang penggunaan mekanisasi dan sistem teknologi yang memungkinkan dilakukan dicoba intervensi di sana.

Dalam rangka pengelolaan lahan tahun 2021 Kementerian Pertanian telah melakukan koordinasi intensif dengan K/L Kementerian dan Lembaga dan pembagian tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing seperti rincian tersebut:

1. Kementerian Pertanian bertanggung jawab melakukan SIDE penyiapan lahan, pengolahan tanah, intensifikasi dan dukungan alsintan saat pratanam. Selanjutnya memberikan dukungan saprodi, benih, dolomit, pupuk, herbisida, pelatihan dan bintek saat penanaman, memberikan dukungan mesin dan alat pengolahan pascapanen dan promosi serta fasilitasi pemasaran.
2. Kementerian LHK bertanggung jawab dalam dukungan penyusunan AMDAL, *Rapid Assessment*, penyiapan sertifikat tanah dan pemanfaatan perhutanan.
3. Kementerian PUPR bertanggung jawab sebenarnya membangun dan merehabilitasi irigasi, penyiapan dokumen Amdal dan penyiapan SID kanal dan saluran irigasi.
4. Dukungan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa atau PDT, PEMDA dan perusahaan asuransi seperti tersaji pada bahan Raker.

Melalui sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut diharapkan kegiatan *Food Estate* di Kalimantan Tengah akan jalan optimal dalam mendukung penyediaan pangan penduduk serta memberi dampak ekonomi di daerah, yang demikian kekuatiran FAO akan bahaya kekurangan pangan seperti yang disampaikan sebelumnya sebagai peringatan akibat dampak COVID-19 tidak terjadi di Indonesia.

Iya sedikit jadi catatan bahwa Menhan masuk untuk menanam singkong 60.000 hektar tahun ini dan saya nyatakan bahwa saya tidak ikut kalau itu, saya hanya fokus pada 30.000 dan tidak boleh dicampur yang mana yang ditangani oleh Menhan, yang mana yang ditangani oleh kami. Minta izin pak, tapi ini untuk jadi catatan aja karena tentu diluar tupoksi kita.

**KETUA RAPAT:**

Jadi 165.000; 30.000 untuk padi,60.000 untuk singkong?

**MENTERI PERTANIAN:**

Tadinya seperti itu, tapi kami udah ada pembicaraan bawah 60.000 dan lain-lain untuk singkong tidak masuk keareal kita.

**KETUA RAPAT:**

Saya paham dari 165.000 itu bagi ga?

**MENTERI PERTANIAN:**

Tidak, diluar itu. Cari lokasi lagi karena kalau tidak mereka masuk pak.

**KETUA RAPAT:**

Ini kabupaten mana?

**MENTERI PERTANIAN:**

Kepulauan Pisau maupun Kapuas.  
Izin kami bicara khusus kalau ini.

**KETUA RAPAT:**

Satu lagi, nanti produksinya sekian banyak ini ceritanya ini ceritanya. Konon katanya ini kalau 1 hektar menghasilkan 6 ton gabah kering giling, nanti jualnya kemana?ongkosnya berapa?transportasinya berapa? pasar terbesar adalah Pulau Jawa, jangan sampai seperti yang lalu. Periode yang lalu menterinya ingin beli sapi sampai bikin kapal, kapal angkut sapi dari NTT. Dirjen masih jalan nggak kapal sapinya?masih jalannya ga kapal sapinya?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc.):**

Sebagian Ketua yang dari NTT masih. Ini kan sudah 50.500 ekor per satu rate dan itu di beberapa pengusaha itu mengisi pak, jadi dia akan jalan setelah penuh. Makasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Jadi kalau kapalnya enggak penuh, 3 bulan ya 3 bulan baru jalan ini kapal. Biayanya? berapa kali lipat sama Australi? anda bisa hitung ga dirjen?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:**

Izin Pak Menteri, Pak Ketua.

Hitungan untuk saat ini, itu kita bisa menekan biaya dan penyusutan bobot badan sebenarnya intinya dari situ. Memang secara efisien, tidak seefisien dengan yang ada di luar.

**KETUA RAPAT:**

Anda jawab singkat saja, ya 1 ekor biayanya 1 banding berapa dari Australi ke Lampung sama NTT ke Jakarta? coba hitung.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:**

Baik kami akan hitung sekarang Pak Ketua angkanya, angka pastinya belum kami tahu pak karena periode ini belum ada data pengiriman. Karena yang terakhir ada subsidi Pak Ketua, kan sekarang sudah tidak ada. Itu yang kami akan hitung pasca subsidi ini.

**KETUA RAPAT:**

Saya kasih tahu anda biayanya 1 ekor sapi dari NTT, sambil nunggu segala macam itu mencapai 1Juta s.d. 1,5 juta. Dari Australi nggak sampai 200.000 karena sekali berangkat bawanya 30.000 ekor, dari NTT ke Jakarta bawanya *insya Allah* dalam sebulan bisa 500 ekor sambil nunggu ini kapal. Nunggu kan tetap dihitung biayanya kaptennya makan enggak? kalau enggak makan kaptan kapalnya mati. ABK nya makan nggak? iya makan. Jadi saya berpikir, ini harus dipikir dari awal ini jangan kalau katakan Kang Momon ini; *kumaha engke?* bagaimana nanti? kalau saya berpikir nya beda, nantinya bagaimana setelah ada hasil ini yang hebat sekali?angkutannya gimana? Pulang Pisau nyari pelabuhan dulu berapa ratus kilo? iya sampai sana dibongkar, nggak mungkin di sana ada alat curah beras enggak ada, pasti pakai karung dibongkar naikin kapal. Kapal nya jalan ke Surabaya lah contohnya, ini harus dipikirkan juga begitu loh.

Jadi nanti menteri kalau rapat dengan Menko, dengan Presiden pak kalau nanti kami sukses biaya angkutnya mahal loh pak. Nah sama juga, mohon maaf ini kalau saya nyinggung BUMN yang namanya Kapal Pelni itu sebagian besar rugi,

begitu pula angkutan ikan dari Papua ke Jakarta pasti rugi biaya dari Jakarta ke Papua ga bawa apa-apa, dari Papua baru bawa ikan. Ini harus kita pikirkan jangka panjangnya kalau nanti menteri bicara dengan Presiden, pasti Presiden mengatakan saudara Menteri anda layak mendapat bintang. Nah lanjutkan.

#### **MENTERI PERTANIAN:**

Siapa Ketua akan saya perhatikan, akan saya bicarakan dan *insya Allah* ini menjadi bagian-bagian yang akan ikut menjadi desain kami kedepan.

Pimpinan dan Anggota dewan yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja pada hari ini, apa misal masih diperlukan penjelasan lebih rinci saya mohon berkenan Pimpinan agar Pejabat Eselon I yang bersangkutan dapat diberi kesempatan memberi penjelasan tambahan. Ada beberapa hal yang *insya Allah* akan kami laporkan secara khusus juga kedalam sesudah Rapat Kerja ini. Atas perhatian Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV dari apa yang menjadi hasil salah kami akan selalu taat dan mencoba menyesuaikan apa yang menjadi pikiran-pikiran Ketua dan para Anggota Komisi IV yang ada. Saya menyampaikan terima kasih begitu besar perhatian Komisi IV untuk kami sukses, ini yang akan menjadi sangat dalam bagi saya bapak dan saya kerja di lapangan. Suatu saat kami mohon juga ada beberapa bersama Eselon I kami yang melihat langsung ke food estate itu sampai penerapan seperti apa dan untuk sementara kami yakin dengan 30.000 itu kami masih yakin bapak, tapi bagaimana hulunya, hilirnya nanti seperti yang Ketua *sinylemen* ini menjadi bagian-bagian yang harus kami perhatikan. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Mohon petunjuk lebih lanjut.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Menteri kemarin saya dikomplain sama Pak Bambang Purwanto daerah Kalimantan Tengah. Pak Menteri ada kunjungan ke *Food Estate* kunjungannya jam 09.00 WIB, dia dikasih taunya jam 07.00 WIB saya bilang lain kali kamu bangunnya jam 04.00 WIB pagi. Pak saya jam 05.00 WIB sudah bangun, udah Sholat Subuh. Da ada perintah tahu-tahu jam 07.00 WIB baru dikasih tahu, jam 09.00 acaranya. Saya bilang sudahlah ga usah jadi pengemis minta diajak karena saya tahu Eselon I bapak ke Lampung juga ga kasih tahu saya. Bagi saya ga ada urusan, iya?karena kan saya selalu menerima laporan dari daerah oh ini begini, ya sudah biarin aja dia jalan. Iya PSP juga, yang Pak Gatot perintahkan siapa namanya Eselon II Direktur Lahan?setelah ke lapangan nggak ada jelasnya, cuman jalan-jalan saja, iya inget ga? belum ada laporan udah 2 bulan. Kalau memang tidak mau diperbaiki, jangan datang ke lapangan karena nanti rakyatnya akan marah. Dia bilang Bapak Dewan nggak ada gunanya katanya dia yang nengok, saya yang disalahkan.

Iya silakan Pak Dedi lanjutkan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya sangat salut sama ketua ini, detail teknis sangat memahami. Jadi ini kayaknya menteri yang tertunda, detail teknis sampai memahami sampai menghitung perhektar itu membutuhkan 5 orang tenaga kerja kali 30.000, berarti 150.000 tenaga kerja. Penduduk di Pulang Pisau berapa? itu baru di Pulang Pisau, belum pulang tidak kembali. Nah jadi sangat detail, setelah itu nanti punya produk perhektar bisa menghasilkan 5 ton x30.000 ton, nanti berasnya dikirim kemana padinya? angkutnya bagaimana? mobilnya apa? pelabuhannya dimana? berapa ongkos angkutnya? jangan-jangan nanti beli beras di Kalimantan jauh lebih mahal ongkosnya dibanding beras dari Vietnam. Nanti kita beli dari Vietnam lagi kita. Nah saya pikir hal kita ini sering kali bedanya Pak Ketua ini dengan Pak Menteri ini cuman satu; kalau Pak Ketua disini sangat berkuasa menyampaikan sesuatu dengan detail, mengkritik dengan tajam. Kalau Pak Menteri di Rapat Kabinet Rapat Terbatas memang tidak berkuasa, itu saja bedanya.

Itu birokrasi itu kalau sudah perintah pimpinan siap, siap dan besok siapnya bagaimana mungkin bingung juga tetapi harus dipikirkan juga seringkali dinegeri ini ribut menjadi masalah itu 5 tahun setelah selesai masalah pekerjaan. Lahan gambut zaman Pak Harto ributnya setelah reformasi, pekerjaan pada zaman SBY ributnya sekarang. Pekerjaan Pak Amran ributnya baru sekarang sebelum nanti diributkan 5 tahun ke depan dengan berbagai problem yang akan muncul. Mohon maaf kadang-kadang kita tidak lagi dalam posisi berkuasa, tidak menjabat menghadapi berbagai hal yang menjadi musibah kita setelah selesai menjabat jauh lebih perih dibanding kita secara detail kita bicarakan hari ini. Karena kita hari ini untuk menuai panen dimasa depan bukan kita menanam hari ini untuk menuai masalah di masa depan.

Kita seringkali menemui masalah setelah 5 tahun, setelah 7 tahun, saya pikir tidak ada masalahnya. Kita bicarakan secara komprehensif di mana-mana dan kemudian kita detail hitung dari sekarang dan bisa saja Raker memberikan rekomendasi tentang pandangan-pandangan komprehensif yang diberikan. Barangkali di bapak berat hati mengatakannya, katakanlah kepada kami yang sejujurnya walaupun diantara Anggota kami begitu rindu pada bapak untuk selalu berdampingan, walaupun telat WA nya, tapi lebih baik telat daripada tidak di WA sama sekali. Saya pikir itu dan tadi Pak Ketua berulang kali ngomong duka, *kumaha engke, duka teing*, padahal disini ada yang bernama Pak Suhardi Duka.

Pak Suhardi silakan.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat,

Yang saya hormati Pak Menteri bersama dengan Pejabat Eselon I, Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Pengantar Pak Menteri saya kira cukup komprehensif dan jelas dan kita juga sudah melakukan RDP 2 hari. Kami telah menyampaikan pandangan sebagai wakil rakyat karena memang Kementerian diberikan kewenangan menyusun anggaran kemudian kami koreksi bisa menyetujui, bisa tidak dan kami juga melakukan pengawasan.

Koreksi yang kami berikan adalah fokus kepada manfaat untuk petani ada kurang lebih 2 triliun yang kami nilai anggaran itu tidak fokus dan meminta kepada para Eselon I agar lebih fokus lebih bermanfaat adalah untuk meningkatkan produksi dengan membantu petani baik pengadaan bibit, baik bibit unggulan seperti padi, jagung begitu juga perkebunan termasuk ternak, kemudian peningkatan kinerja produksi dengan fasilitas alat produksi begitu juga peningkatan sarana prasarana termasuk jalan usaha tani.

Kemudian kami ingin kembali mengkritisi sebagaimana disampaikan dari Pimpinan dukung Pak Menteri ekstensifikasi lahan 73.000 hektar untuk tahun 2021 dan intensifikasi 55.000 hektar. Saya kurang percaya bahwa ini akan mampu diselesaikan dalam satu tahun. Perkebunan-perkebunan besar saja, saya kira tidak mampu melakukan seperti ini dan tahun ini sudah dilaksanakan penanaman 30.000 hektar tahun 2020. Saya ingin ingatkan perbaiki datanya jangan sampai tumpang tindih antara anggaran 2020 dengan 2021 karena ini akan menjadi objek audit dan penyesalan kemudian hari. Kita semua mendukung *Food Estate*, tapi jangan paksakan harus selesai dalam 1 tahun, bisa 2 tahun bisa 5 tahun yang penting benar-benar efektif, efisien dan bisa menghitung segala aspek sehingga dengan demikian bisa bermanfaat.

Khusus untuk Dirjen Perkebunan, kami kritisi kemarin itu kawasan pengembangan perkebunan. Ini saya tidak melihat terkoreksi, tapi setelah pagi-pagi saya dikasih ada koreksi sedikit. Saya minta pak supaya ini difokuskan, jangan terlalu luas iya tapi betul-betul fokus sehingga bisa kita lihat, bisa kita tinjau pada saat kunjungan-kunjungan kerja mana itu yang dibiayai dengan pengembangan kawasan yang miliaran Rupiah itu karena ini saya lihat bahwa bukan Kementerian yang melaksanakan tetapi Dinas yang melaksanakan, nah ini.

Yang kedua Dirjen PKH, saya ingin kritisi ulang karena benih ternak unggul 5,9 juta bibit ini dengan harga Rp900.000-an itu kemahalan pak hati-hati, bibit ... itu sampai dengan Rp900.000-an lebih itu saya kira perlu dihitung betul jangan sampai *mark up*. Kemudian juga bibit ternak unggul 65 juta per ekor, ini bibit ternaknya dari mana? impor? itu baik-baik sehingga jangan menjadi kemahalan di dalam APBN kita.

Balitbang, Sulbar adalah provinsi baru, untuk itu lembaga riset dan uji benih saya minta ada di Sulbar, satu-satunya provinsi yang tidak ada lembaga ini. Demikian saya selalu meminta agar ini menjadi prioritas Pak Litbang supaya ada di Sulawesi Barat. Yang terakhir adalah kita sudah buat laporan atau kesimpulan bahwa rekomendasi-rekomendasi itu penting tapi tidak lagi menjadi tanggung jawab

Anggota Dewan tapi menjadi tanggung jawab Pemerintah. Olehnya itu antara Eselon I-nya dengan Eselon III-nya, Eselon IV-nya itu sampai kebawah supaya TA-TA kami tidak menjadi persoalan, selalu dituntut untuk rekomendasi dinas-rekomendasi dinas sedangkan kesimpulan kita disini sudah tidak menjadi tanggung jawab Anggota tapi menjadi tanggung jawab Pemerintah. Olehnya itu mitra kemitraan bisa harmonis, tidak saling menganjal dan lain sebagainya, dengan demikian Pemerintah dan Komisi sebagaimana harapan Pak Menteri, harapan Ketua sama-sama bertanggung jawab dan sukses secara bersama.

Saya mengapresiasi dan sedikit optimis bahwa pertumbuhan dikementerian atau di sektor pertanian kita masih tumbuh positif dan peningkatannya terjadi peningkatan dibanding dengan tahun 2019. Saya kira ini kerjasama seluruh petani di Indonesia dan inilah yang menyelamatkan Indonesia dari kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini. Saya kira ini tetap perlu terjaga dan *insya Allah* kalau ini terjaga walaupun kontraksi pertumbuhan disektor yang lain tapi pangan tetap stabil saya yakin Indonesia akan selamat dan bisa keluar dari Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq.  
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

saya pikir tidak duka lagi sekarang, sudah jelas arahnya, ada optimisme dalam menangani persoalan pertanian di Indonesia. Yang berikutnya tidak punya areal sawah yang terluas mungkin kebanyakan juga makan sagu disana, punya areal laut yang luas tetapi ingin juga orang yang tiap hari menghasilkan ikan memiliki kecukupan beras dan selalu yang ini yang disampaikan oleh Ibu Alien Mus, mangga dan hari ini ada beda dandanannya karena hari ini PSBB tanggal 14 plus kacamatanya yang baru. Terima kasih.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan saya Kang Dedi beserta Bapak/Ibu Komisi IV, Tentunya yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian, Bapak Sekjen, Bapak Irjen beserta jajaran Eselon I.

Pertama saya ingin sampaikan terima kasih atas ralat slide karena tadi sebelumnya kita belum dapat. Dari Bapak Menteri tanya saya coret-corek beda ternyata ini sudah ada ralat dari Mentan. Kedua karena ini data yang disampaikan adalah apa yang dipaparkan Pak Mentan, jadi tolong segera agar dibuat satu dokumen negara karena ini tidak bisa di copy-copy seperti ini mohon maaf karena ini

adalah pengajuan anggaran di Komisi IV dan juga akan dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan Komisi IV dan juga Pak Menteri.

Pak Menteri izinkan saya menyampaikan bahwa kemarin kita RDP dengan Bapak Sekjen dan juga beberapa Eselon I. Ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Komisi IV termasuk benih itu masih ada yang sudah di pertanyakan tapi belum ada jawabannya tapi masih ada dalam penjabaran seperti Bibit Sagu, Benih Sagu ada di perkebunan kalau nggak salah.

Terus mohon maaf Pak Menteri saya ingin sampaikan data yang disampaikan kepada hari ini kurang lebih memang ada perubahan dalam penggunaan penganggarnya karena memang sudah dijelaskan tadi tapi apa yang dipertanyakan masih masuk dalam arti kata beberapa pertanyaan kami di Komisi IV itu tidak diindahkan. Bapak lihat di Dirjen Bun, saya sudah coret-coret ini pak karena kita dikasih waktu paling lama 5 menit. Saya minta izin Pimpinan agar saya bisa bacakan karena ini ada beberapa yang kita sudah tanyakan kemarin tapi masih ada lagi; kawasan tebu, terus juga kawasan sagu itu ada di halaman 29, apakah ini masih tetap atau memang sudah ditiadakan atau mungkin pengurangan? terus juga ada di halaman 31 itu ada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ada di halaman 31. Itu di bagian tambahan anggaran sesuai Surat Bersama pagu anggaran ada di pengadaan indukan sapi, kemarin juga pengadaan indukan sapi itu menjadi permasalahan.

Terus juga ada pengembangan unggas lokal itik, itu juga kemarin dipertanyakan tapi masih ada terus juga ada di halaman 33 PSP, perbengkelan alsintan ada 18 unit ada dimana pak? kita perlu pertanyakan ini. Terus di Balitbang, kita dapat masukkan dokumen seperti ini tapi tolong karena ini adalah dokumen negara, dimasukkan penjabaran anggarannya, jangan hanya totalnya saja.

Terus di halaman 36 itu BPPSDM juga, pak itukan kemarin sudah ada pertanyaannya dari Komisi IV, ini juga masih masuk nih didalam sini. Kan bapak masih punya catatannya ya BPPSDM? terus saya ingin mempertanyakan ada masuk juga dalam pupuk cair itu kan dari awal sudah kita permasalahan ya? pupuk cair itu tapi disini masih kita lihat ada bantuan pupuk ada sekitar 235.000 hektar kalau harga satuan 265.000 ya? itu masih masuk Pak Ketua sementara saya masih ingat Raker dan RDP kita sudah bermasalah juga nih soal pupuk cair ini, tapi masih masuk belum masuk ke laporan ke Komisi IV juga pemberitahuan.

Itu saja Pak Menteri karena tidak bisa saya paparkan satu persatu karena banyak poin per poin. Jadi mohon agar menjadi acuan dan perhatian dari Bapak Menteri beserta jajaran terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu Alin.

Bu Alin melebihi tegaskan pada persoalan sagu kemudian berbagai anggaran tentang peternakan dan yang paling utama, yang terakhir dia ingin pupuk cair itu dipadatkan katanya. Jadi persoalan pupuk cair selalu menjadi bahasan, apakah



memang karena terlalu cair selalu menjadi masalah? ya nanti silakan dijawab. Apakah harus masih dicairkan atau dipadatkan? nanti di jawabnya nanti, Bu Alin ya?selanjutnya waktu pertama saya ketemu udah hampir satu tahun dengan hari ini sudah semakin berbeda, makin rapi bajunya selalu disetrika, rambutnya tersisir harum walaupun sebenarnya orang harum hari ini tidak bermanfaat karena kalau harum akan didekati sehingga *social distancing*-nya tidak berjalan. Yang bagus itu orang bau, jauhi banyak orang jauh lebih selamat sebenarnya dan iya pakai kacamata, ngomongnya tertata padahal jauh dari Nusa Tenggara, Pak Johan Rosihan.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta seluruh jajaran Eselon I Kementerian Pertanian.

Yang ingin saya sampaikan menyambung Ibu Alin tadi itu saya soal koordinasi Pak Ketua. 2 soal koordinasi, yang pertama soal data; tadi ada bahan terus ada ralat slide ke-13 kemudian ada lagi data yang masuk kekita padahal kita kan sudah menyepakati ini Hari Jumat terakhir kemarin artinya ini sudah dikerjakan tetapi datanya pun masih beda-beda, nah koordinasi nya gimana pak? bisa dijawab nanti kami awal, kemudian menyaksikan niat baik itu tetapi bolehlah dijawab nanti karena saya minta untuk dijelaskan itu yang pertama.

Yang kedua dalam sambutan Pak Menteri ini saya coba kutip dihalaman 9, sebagai agenda terakhir izinkan kami melaporkan tentang kegiatan *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Presiden khususnya guna mengantisipasi kemungkinan dari FAO itu Kementerian Pertanian telah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga lain untuk merancang program food estate tersebut. Dalam sambutan ini Pak Menteri ingin mengatakan kepada kita bahwa beliau itu aktif dalam merancang kegiatan *Food Estate* tadi tetapi apa yang dipertanyakan oleh Pak Ketua tadi secara lugas itu, Pak Menteri pun tidak bisa menjawab secara bagus menurut saya, minimal itu pengamatan saya Pak Menteri mohon maaf.

Saya sejak awal itu termasuk salah satu orang yang menolak program *Food Estate* ini karena pertama dia membebani anggaran mitra Komisi IV, satu. Yang kedua nomenklatur yang dipakai pada mitra Komisi IV itu adalah mendukung, Kementerian Pertanian mendukung *Food Estate* anggarannya 2.5 triliun, mendukung food estate anggarannya 1.2 triliun. Kita lihat juga nanti di Kementerian Lingkungan Hidup mendukung, yang didukung mana?ketika Pak Menteri tadi mengatakan bahwa ikut merancang, tolong paparkan kepada kami pak konsep induk *Food Estate* itu seperti apa?sehingga kita mendukungnya dengan ekstensifikasi, kita mendukungnya dengan perbaikan irigasi, kita mendukungnya dengan ini. Yang kita mau mendukung itu kayak apa sih gambaran utuhnya?nah karena menurut saya kalau misalnya *food estate* itu dipusatkan di Kalimantan Tengah, ini adalah sebagai bentuk ketidakadilan anggaran di Indonesia ini. Konsep *Food Estate* ini ingin

mengatakan kepada kita bahwa kita ingin menghapus Indonesia itu sebagai negara agraris.

Di Indonesia dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau pak tidak cocok kita membuatkan satu pusat pertumbuhan saja soal pertanian. Seperti Pak Ketua sampaikan tadi kalau kita pusatkan di Kalimantan hasilnya begini, begini, begini bagaimana cara distribusinya ke seluruh Indonesia ini? karena kalau soal ketahanan pangan ini pak bukan hanya bicara tentang produksi pak, *Food Estate* itu hanya bicara distribusi. Masih ada 2 faktor yang lain soal distribusi dan soal keterjangkauan, kalau kita bicara soal ketahanan pangan. Nah karenanya konsep *Food Estate* ini yang ingin ditawarkan ini dengan menjadikan Kalimantan Tengah sebagai induk pak, ini menyalahi konsep Negara Kesatuan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Karenanya Pak Ketua saya ingin mengusulkan dalam rapat ini, karena ini membebani Mitra Komisi IV, tolong pak konsep *Food Estate* ini bisa kita tinjau kembali untuk kita ajukan kepada Badan Anggaran agar kita tidak menyetujui konsep *Food Estate* ini karena ini mengingkari konsep Negara Kesatuan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau ini bicara tentang distribusi dan segala macam. Saran saya pak lebih baik anggaran yang banyak ini yang 2,2 triliun; 1,2 triliun untuk ekstensifikasi ini lebih baik untuk kita memelihara kembali cetak sawah-cetak sawah yang banyak dicetak oleh Kementerian Pertanian ini. Kalau cetak sawah-cetak sawah yang terlantar itu, kita kasih anggaran 2,2 triliun; 1,2 triliun ini pak selesai urusan irigasi itu pak. kalau sudah selesai urusan irigasi.

**KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN,S.E.):**

Izin Pak Johan.

Yang cetak sawah kemarin itu gagal, ga jelas. Masa mau dicetak lagi?

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Bukan itu pak, perbaiki irigasinya karena kan kemarin waktu itu kita awal itu kita bertanya cetak sawah itu apa sih? kan itu pertanyaan utama dari Komisi IV, apa yang dimaksud dengan sawah? apa sekedar hamparan tanah? nah itu saya bilang tadi kalau anggaran *Food Estate* itu tadi diberikan kepada untuk memperbaiki keterlantaran cetak sawah baru itu dengan irigasi yang bagus dengan sumber air yang bagus, saya pikir selesai persoalan. Jadi konsep negara kesatuan itu jangan dipusatkan dalam suatu daerah karena seluruh Indonesia ini adalah pusat produksi pangan, kalau misal daerah kering; dia punya Sorgum, dia punya sagu dia punya apa, nggak bisa disatukan, Indonesia ini dengan 1 komoditas pangan. Jadi Pak Ketua mohon ini kita pertimbangkan kembali untuk kita mungkin Komisi IV tidak mendukung dengan sistem penyatuan menjadikan satu sumber produksi soal pangan ini di Kalimantan Tengah.

Yang berikutnya pertumbuhan-pertumbuhan pertanian itu kemudian tidak diikuti oleh kesejahteraan petani Pak Ketua. Betul bahwa Menteri Pertanian tadi itu sudah menyampaikan kita diukurnya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, padahal kalau tidak ingin membandingkan, saya mencoba memahami kenapa dibandingkan dengan bulan sebelumnya? karena ini COVID. Sebenarnya kalau kita

ingin bandingkan, bandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Saya mencatat 3 tahun terakhir pak, NTP bulan Agustus 2018;102, NTP bulan Agustus 2009; 103, NTP bulan Agustus tahun ini itu 100 artinya kita mengalami turun 3% dinilai padahal Presiden sudah menyatakan bahwa target kita 2021 adalah 102 sampai 104, nilai tukar petani kita. Nah bagaimana caranya Menteri Pertanian itu menyeimbangkan antara produksi dengan kesejahteraan petani, untuk itu pak saya tanya lagi soal koordinasi pak. Kalau bapak bisa berkoordinasi tentang food estate tentu Pak Menteri juga bisa berkoordinasi tahu soal harga komoditas kita ya? kita sudah subsidi di awal, subsidi produksi dengan alsintan, dengan benih segala macam tetapi ketika petani panen pak, semua menjerit soal harga. Tolong jelaskan kepada kami Pak Menteri, bagaimana koordinasi bapak dengan Menteri Perdagangan soal harga ini yang membuat petani kita itu menjerit ketika panen? terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Johan telah menyampaikan pokok-pokok pikirannya dan barusan Mbak Aliennya nggak ada ya? itu kemarin tuh Pak Menteri kita bareng sama Bapak Dirjen Tanaman Pangan ya, kita berkunjung ke salah satu perusahaan yang mengelola limbah-limbah dari pasar kemudian limbah dari TPA, kemudian menjadi pupuk cair dan saya tidak bermaksud untuk bahwa atau tidak tetapi kerangka berfikir kedepan para petani juga untuk didorong, untuk bisa di setiap kabupaten kota membangun hal yang sama. Kita bisa menginisiasi anak-anak yang pintar, pintar itu sudah banyak sekarang ahli pupuk organik, organisir kemudian TPA-TPA dan limbah pasar dimanfaatkan, kemudian dibangun pupuk organik di berbagai daerah bisa kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah serta Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Saya pikir ini sangat baik untuk kita tidak terlalu tergantung terhadap pupuk kimia dalam jangka panjang.

Dan Bapak Ibu yang saya hormati.

Kita akan fokus dulu yang bicaranya itu representasi fraksi dulu, jadi sudah kan tadi dari Demokrat sudah, dari Golkar sudah kemudian dari PKS sudah. Sekarang kebetulan di tangan saya dan tatapan Pak Menteri ada Mbak Lulu yang representasi dari PKB juga di ruangan ini dan kalau Mbak Lulu bicara itu antara mata, tangan, kaki dan badan itu hidup pak. Kalau saya kan kalau bicara cuman statis mukanya saja, nah ini bisa mengakibatkan degup jantung, degup jantung para petani dan Mbak Luluk ngeluh terus dari tadi ke saya kenapa sih kalau karyawan pabrik yang gajinya Rp4.000.000 bisa ditambah 600, yang gajinya Rp3.000.000 tambahnya 600?kenapa sih buruh tani yang nggak jelas gajinya kok nggak ditambah-tambah? kok Pak Menteri nggak bisa sih ke Presiden meyakinkan agar buruh tani, para petani sama dengan karyawan pabrik? apakah petani dan buruh tani harus diorganisir oleh saya? apakah saya harus memimpinya untuk mendapatkan subsidi? itu kan?silakan.

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):**

Sudah disampaikan oleh Pak Ketua pertanyaannya.

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri dan Bapak Ibu semua yang saya hormati.

Yang ada beberapa hal kecil pertanyaan saya, yang pertama memang masih tentang *Food State* Pak Menteri. Jadi kegelisahan di Ruang Komisi IV, saya kira banyak juga kegelisahan yang sama yang dirasakan oleh temen-temen, banyak pihak yang *concern* dengan isu *Food Estate* ini. Semakin ke sini ternyata semakin punya keraguan sebenarnya, apakah *Food Estate* ini sesuatu yang besar yang memang nyata dan itu memungkinkan untuk bisa dilakukan meskipun bapak tadi sudah menyampaikan optimisme di sana tetapi karena memang bayangan itu nggak sama dengan bayangan kami sehingga mungkin perlu bukan hanya soal diyakinkan tetapi seberapa mungkin sebenarnya ini memang bisa dilakukan? contoh dari Jawa ketika Pemerintah mengatakan bahwa *leading* sektor ini adalah Kemenhan, itu saja sudah membuat pertanyaan yang besar. Begitu tadi ditanya kontribusi dari kementerian yang terlibat, saya malah belum tahu Kemenhan posisinya ada di mana nih? misalnya seperti itu. Kalau Kementerian Pertanian kan jelas apa yang mau dilakukan? kemudian KLHK juga begitu, PUPR juga demikian.

Nah yang bagian Kemenhannya malah apa? kecuali tadi yang 300 Babinsa itu, nah apakah itu bagian dari yang tadi kontribusi oleh Kemenhan yang katanya dengan *Food Estate* itu? sementara di sisi lain kalau kemudian Pak Menteri tadi bilang bahwa lebih kurang 30.000 hektar itu yang memang akan dilakukan, apakah cukup hanya dengan 300 Babinsa itu? ataukah sebenarnya sudah ada *existing* tenaga kerja petani di sana?itu jumlahnya berapa? mereka tersebar di mana? apakah itu mereka memang tinggal di sekitar lokasi ini? apakah lokasi ini memang satu hamparan yang langsung 30.000 hektar atau sebenarnya dia terbagi-bagi entah ada di mana begitu? mohon maaf sekali karena kekurangtahuan saya barangkali.

Kemudian yang kedua apakah juga sudah dihitung? dulu mungkin sudah pernah ada pertanyaan Pak Menteri ya, yang terkait dengan peta besaran terkait dengan *Food Estate* ini? apakah juga sudah dihitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi? kalau semisal harus ada mobilisasi tenaga kerja yang sangat besar, yang mau tidak mau mungkin dia didatangkan dari luar daerah. Apakah ini juga tidak ada resistensi yang kemungkinan-kemungkinan itu akan muncul? nah yang kedua Pak Menteri ini kan sebenarnya lahan-lahan yang bisa dimaksimalkan, yang bisa diintensifkan, itu di daerah yang selama ini menjadi pusat-pusat produksi pertanian itu kan sebenarnya masih luar biasa sekali.

Saya baru agak *surprise ngapunten* Mbak Ema di Jombang, karena saya memang lahir di Jombang bahwa ternyata di Kabupaten Jombang, di salah satu kecamatan di sana, yang dulu saya kenal sebagai pusat padi aja ternyata hanya bisa menghasilkan panen itu maksimal dua kali dalam satu tahun. Apa yang menyebabkan itu? karena menurut mereka itu nggak ada air begitu, itu artinya apa? seandainya ada intervensi yang sangat serius yang terkait dengan infrastruktur

pertanian kita, mungkin gak perlu capek-capek kita bikin *Food Estate* itu gitu. Kenapa? karena dalam 1 tahun ternyata bisa aja di daerah-daerah yang udah jelas nih bisa menghasilkan padi 8, 9 ton saja itu bisa 3 kali atau bahkan lebih. Kayak di Kabupaten Sragen itu *ngapunten* Pak Menteri, itu sudah masuk tanam ketiga sekarang, di saat yang lain itu baru kedua.

Nah itu artinya apa? itu artinya kalau misalkan kita berpikir bahwa model lahan-lahan seperti ini, yang kita bisa memaksimalkan dengan adanya saluran irigasi yang bagus, mungkin sumur-sumur yang bagus, kemudian juga saprodi dan lain-lain itu sangat bagus, jangan jangan jawabannya memang bukan *Food Estate* begitu, karena apa? karena sudah bisa dihitung, sudah bisa dinilai bawah ini sesuatu yang realistis untuk kita bisa lakukan dan yang kedua ya ini bagian dari bentuk dukungan kita kepada para petani dan juga daerah-daerah yang memang memiliki komitmen untuk bisa menjadi penyangga pangan kita, apalagi kemudian ada beberapa kabupaten banyak ya kabupaten yang mereka sudah punya Perda untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk hal-hal yang lainnya.

Nah bentuk-bentuk reward dan dukungan negara atau Pemerintah kepada daerah-daerah yang seperti ini kemudian apa? kalau kemudian malah yang terakhir *ujung-ujung* ketemu yang namanya *Food Estate* itu. Sementara *Food Estate* ini tadi juga nggak jelas, apakah dia lahir dari Kementerian Pertanian atau kah ini sebenarnya order dari Pemerintah yang itu CQ nya kita nggak ngerti ada di mana kek gitu ya.

Nah saya kira yang terakhir, saya juga berharap mungkin yang konteksnya dengan ketahanan pangan. Saya kira kita perlu memberikan perhatian yang agak cukup besar Pak Dirjen juga Pak Menteri dukungan untuk kelompok-kelompok perempuan dan juga keluarga-keluarga petani itu menurut saya sudah waktunya bukan hanya sekedar komplementer atau hanya sekedar pelengkap gitu tetapi bagaimana ini juga bisa kita angkat sebagai satu program yang memang bentuk dukungan dari negara dan pengakuan bahwa peran perempuan disektor pertanian itu sangat besar. Kemarin saya punya kegiatan *ngapunten* Pak Ketua, kita coba breakdown, apa sih yang dilakukan oleh perempuan di dalam sektor pertanian, dia itu berperan di mana itu perempuan? ternyata dari hulu sampai hilir itu selalu ada tangan perempuan pak, mulai dari penyiapan, mulai dari produksi yang kemudian sampai pengolahan bahkan kemudian juga distribusi, bahkan sampai the end-nya begitu. Ketika di meja makan Pak Menteri, Pak Dirjen dan kita semua ternyata ada tangan perempuan tetapi saya belum melihat agak serius dimana perempuan ini kita tempatkan di dalam desain besar Kementerian Pertanian.

Saya kira itu terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Mbak Lulu saya ucapkan terima kasih, paparan yang menarik. Yang pertama kerangka berpikir kenapa Kemenhan? mungkin dalam kerangka berpikir adalah bahwa Kemenhan itu punya pasukan diantaranya pasukan seni yang bisa merubah

areal-areal menjadi persawahan, punya alutsista yang bisa digunakan untuk kepentingan pertanian, itu mungkin cara berpikirnya. Tetapi memang kita menyepakati bersama kalau ingin cara berpikir efektif tanahnya sudah subur, tenaganya sudah banyak, transportasinya ya sudah sangat mudah yaitu Tanah Perhutani, Tanah PTPN yang kosong itu banyak *seabrek-abrek* begitu. Di tempat saya aja yang wilayahnya hanya 92.000 hektar itu adalah 15.000 hektar, tetapi ya saya tidak tahu kerangka apa mungkin ada gagasan pemikiran lain yang jauh lebih besar dibanding persoalan beras. Kalau urusan beras saya pikir dan kemudian Balitbang Kementerian Pertanian juga sudah punya Bibit Gogo yang bisa ditanam setahun dua kali dengan hanya 90 hari ya? 90 hari dan saya juga udah nanam itu. Nah itu tetapi semuanya mungkin berharap pada satu hal, mudah-mudahan ini saya juga nggak ngerti kenapa Pak Johan dulu, Mbak Lulu kemudian Pak KHalid? kenapa Mbak Lulu diantara Pak Johan dengan Pak Khalid, saya tidak mengerti. Yang mengerti dari seluruh rangkaian itu adalah hanya pada Tuanku Khalid.

**F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ketua, Wakil Ketua dan seluruh teman-teman Anggota Dewan Komisi IV, Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh yang hadir.

Pertama sekali saya hanya menambahkan sedikit tadi rupanya telah disampaikan oleh Pak Suhardi Duka juga bahwa sekian hari kita telah melakukan RDP sudah pada titik kesimpulan. Saya hanya ingin mengingatkan pada kesempatan ini apa yang telah kita sepakati, kita konsisten dengan apa yang telah dilaksanakan. Saya yakin semangat juang Pak Menteri luar biasa tetapi sebuah perjuangan tanpa konsekuensi tidak berarti apa-apa sehebat apapun perjuangan kita karena berakhirnya sebuah perjuangan bukan karena kehebatan kita tapi konsisten terhadap langkah yang kita kerjakan. Begitu juga yang kedua menyangkut *food estate*, saya tidak membicarakan *Food Estate* disini, karena ini bukan program bukan visi misi menteri, ini visi misi Presiden. Cuma apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bukan berarti kami tidak sepakat tetapi bagaimana setiap rupiah yang kita keluarkan, tidak *double* dengan kementerian yang lain.

**KETUA RAPAT:**

Pak Khalid mungkin menyepakati agar Kementerian Pertahanan diperluas pembangunan areal *Food Estate*.

**F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):**

Begini, menyangkut diperluasnya tugas Kementerian Pertahanan itu urusan Presiden tetapi bagi saya hari ini sebagai Anggota Komisi IV hanya mengingatkan sebagaimana saran Pak Sudin anggaran yang kita keluarkan yang rasional bukan berarti kami nggak yakin, malah mungkin kalau Pak Sudin tadi menyampaikan kita mampu nggak dengan 30.000 itu? saya juga pesimis dengan itu maka *tracing* yang diberikan oleh Pimpinan kami dan juga saya menjadi perhatian kita semua dan izin

Pak Ketua kalau bisa izinkan waktu kita turun sekali Pak Ketua untuk melihat langsung. Kalau ketua ga bisa, saya juga nggak mau.

Oke kemudian pada kesempatan ini pak izinkan saya meminta bantu agar dapat diberikan kepada saya kalau mungkin teman-teman yang lain tidak butuh, kalau butuh silakan diberikan, saya perlu di setiap Eselon I atau Dirjen tolong direkapitulasi ke kami anggaran yang langsung ke masyarakat, yang swakelola berapa? dan kemudian yang melalui pihak ketiga berapa? ini perlu rincian itu kepada saya agar saya bisa mengawasi nanti yang lebih *inten*.

Kemudian menyangkut dengan dana DAK yang sekian banyak salah satunya untuk bangunan lumbung pangan masyarakat desa. Kemarin penjelasan dari Pak Agung ya? kalau nggak salah 500 unit ya? malah tahun lalu, tahun-tahun yang lalu sudah ada sekitar 5 ribuan totalnya sekarang berarti hampir 5.000-an lebih pak tapi belum bisa berjalan karena keterbatasan anggaran. Saya menyarankan, kita bukan hanya sekedar membangun gedung dengan DAK yang orientasi pada *fee*. Harapan saya itu jalan, maka saya minta kepada Pak Menteri ini kita dorong dengan BLU apalagi penjelasan Pak Dirjen kemarin stok yang diberikan keluar, masuknya juga harus penambahan 10% berarti ini kan ada keuntungan yang didapat dari penjelasan Pak Agung kemarin. Saya berharap agar 5000 sekian itu bisa berjalan maksimal kalau keterbatasan modal didorong aja dengan BLU, saya pikir biar jalan jadi bangunan tidak ada sia-sia saya pikir.

Kemudian menyangkut jaringan tersier sedikit pak, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dedi tadi dan juga Bu Lulu tadi, ini jangan cemburu. Tadi Bu Luluk menyampaikan ada daerah beliau itu malah irigasinya tidak ada kedaerah sawahnya begitu produktif. Saya pikir yang mengerti yang tahu persis tentang produksinya sebuah lokasi itu pertanian tetapi disana di PUPR juga ada jaringan irigasi, bisa nggak pak ini mohon ada penjelasan sedikit agak dikoordinasikan karena ada di tempat saya di Aceh, ada yang dibangun oleh PUPR malah mungkin bukan daerah yang begitu penting. Ada ini perlu sinkronisasi antara kelembagaan agar target kita ini sukses karena hebatnya pertanian dan hebat PUPR juga terganggu bagi kita semua. Saya pikir ini Pak Ketua yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya berharap bisa kita tinjau *Food Estate* kendati pun mungkin ketua bisa berubah. Kalau ketua tidak pergi, saya juga ga bisa pergi. Terima kasih Pak Ketua.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik berdasarkan penghitungan tanggal dan bulan serta peredaran bintang Pak Ketua itu tidak mungkin berangkat ke Kalimantan Tengah gitu ya, jadi itu mohon dicatat sampai nanti bulannya beredar normal kembali dan yang ini hanya ngingetin aja pak. Dulu zaman Pak Harto itu selalu setiap desa itu dibikin Gudang ... terbuat dari seng ditutupin dan akhirnya dibongkar semua sekarang tidak berfungsi lagi. Saya berpikir ya, apakah nanti dibikin gudang-gudang yang sejenis? apakah tidak akan lagi terjadi hal yang sama? beberapa waktu yang lalu itu Kementerian Perdagangan itu bikin resi beras berbagai kabupaten kota, akhirnya apa?kosong

juga tidak berfungsi. Nah menurut saya kalau produksinya melimpah luah di mana-mana nggak ke tabung saya pikir taruh di rumah saja juga masih cukup artinya asa regulasinya berjalan, Bulog terserap, ini terserap tidak ada masalah. Kalau saya cenderung ke Pak Menteri, mari kita dorong kebutuhan pokok petani.

Petani ini sekarang tuh mau nanam yang ketiga dan sudah berjalan itu di berbagai wilayah, saya keliling itu butuh nya cuma satu pak, punya mesin, ada selangnya ditarik ke atas, gitu aja mereka itu. Ada jaringan-jaringan irigasi yang kecil-kecil yang 200 juta yang 150 tapi saya harapkan diberikan pada kelompok merekalah pengelolaannya tidak dalam bentuk penunjukan langsung di Dynasti teknis dan biasanya pada copot lagi. Mereka bisa bekerja di masa pandemik ini dengan upah sehari 100.000, 75.000 kemudian akhirnya mereka dapat dua pak. Mereka bekerja di sawah untuk kepentingan sawahnya sendiri, setelah itu kuli nyangkut dan kuli babat, inilah Indonesia. Saya katakan Indonesia ini kalau nggak ada kelompok petani yang seperti ini sudah ambruk pak, merekalah yang menyelamatkan kita, misalnya itu diperbanyak, diperluas terus dan pengawasan juga sangat mudah mereka dengan sangat baik, itu yang dibutuhkan. Terus kemudian akses jalan menuju daerah areal pertanian karena terlalu jauh juga berat. Kalau sudah ada akses jalan diangkut pakai motor, didorong pake becak jalannya kecil nggak apa-apa sih jalan. Hal-hal yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh kaum petani tradisional di berbagai daerah dan yang terakhir sumber air.

Sumber Air ini sekarang makin menyusut karena hutannya dibabatin di berbagai tempat, nah ini juga harus punya ketegasan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan titik-titik dan berikutnya lagi yang terpenting. Yang terpenting banget Pak Menteri sudah selayaknya Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan itu membeli seluruh sumber air di daerah pak. sekarang itu banyak sumber air yang sudah dibeli oleh swasta kemudian digunakan untuk dijual airnya pakai tangki padahal airnya bermanfaat untuk pertanian di bawah, ditutup di pangkal atau rebutan sama PDAM di berbagai daerah ini harus segera di data pak untuk kepentingan Indonesia jangka panjang karena kalau ini tidak di data orang-orang masyarakat menjualnya ke pihak swasta, nanti mereka petani kita kan banyak kekurangan air terutama petani-petani yang tidak menggunakan sistem irigasi danau-danau besar. Itu sawahnya arealnya kecil yang hanya 5.000 m, 7.000 m tetapi mereka cukup membangun ketahanan pangan karena mereka tidak beli airnya. Cukup ini saran saya mudah-mudahan nanti bisa kita tukar pikiran untuk geser berbagai hal yang dianggap diperlukan dalam waktu mendesak ini dan pikiran-pikiran seperti ini memang sangat merupakan pikiran seorang ibu, emak, Mi dan orang Arab bilangannya Umi sekarang giliran dan Umi ini namanya double emak, umi itu kalau dalam bahasa Sunda, kalau bahasa Jawa mungkin Ema Umi. Nah sekarang giliran Bu Ema dan Bu Umi dua-duanya Ibu sebenarnya, terima kasih.

#### **F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):**

Terima kasih Pimpinan luar biasa.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Pimpinan beserta Bapak Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati,



Bapak Menteri beserta jajaran yang kami banggakan.

Salam sehat semuanya, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

Ada beberapa hal singkat yang ingin kami sampaikan:

Yang Pertama:

- a. Beberapa waktu yang lalu memang sempat terjadi kegaduhan di daerah terkait dengan implementasi kartu tani dan alhamdulillah kami sudah segera berkomunikasi dan dari Dirjen PSP sudah memberikan solusi kepada distributor pupuk. Alhamdulillah sekarang di daerah kami sudah reda, kami hanya memberikan saran terkait implementasi kedepan biar tidak terjadi kegaduhan lagi. Yang kemarin disampaikan yaitu di tempat kami harusnya ada sekitar 84 ribu kartu tani yang harus direalisasikan masih separuh 40 sekian, yang baru realisasi dan itupun ada sekitar 1.700 yang bermasalah. Jadi ada memang yang NIK-nya bermasalah sehingga tidak muncul tidak bisa digesek di mesin EDC-nya.
- b. Ada yang menerima kartu Tani ini juga ada yang meninggal, jadi ini mohon lebih diperhatikan untuk ke depan sehingga perlu diantisipasi permasalahan-permasalahan seperti ini sehingga petani tidak timbul kegaduhan lagi.
- c. Yang kedua, Terkait dengan sosialisasi, kami melihat di sini ada melaksanakan sosialisasi kartu Tani bersama Kementan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten Bandung Barat. Kami mohon di daerah kami di dapil kami penyampaian sosialisasi ini, waktu kami reses, kami bisa dilibatkan untuk ikut bersosialisasi dengan pihak Kementerian Pertanian Dinas Pertanian setempat untuk bisa juga menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat segera untuk bisa familiar dengan adanya pelaksanaan nanti kartu Tani, nah itu yang pertama.

Yang Kedua:

- a. Kepada Badan BPSDM Pertanian terkait program strategis Kementan 2021, kami apresiasi sekali karena salah satunya adalah penumbuhan wirausahawan muda pertanian termasuk santri tani millennial, nanti mohon dijelaskan bagaimana gambaran atau implementasi program tersebut bisa terealisasi dengan baik dan sesuai target? mohon penjelasannya.
- b. Yang terakhir menindaklanjuti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Luluk, beliau ini asli Jombang sama dengan saya. Cuma memang dari dapil Jawa Tengah. Kalau mencalonkan dari dapilnya sendiri tidak jadi Pak Menteri jadi pindah dapil Jawa Tengah baru jadi beliaunya, luar biasa. Ini petani di daerah kami memang sangat mengeluhkan terkait irigasi dan jalan usaha tani. Banyak keluhan dari masyarakat karena perlintasan jalan tol dan juga ada beberapa persawahan yang butuh infrastruktur pertanian diberi combi, tapi combi ini karena harus diangkut menggunakan truk. Nah ini tidak bisa lewat karena jalan usaha tani nya tidak, belum diperbaiki. Jadi tidak bisa menuju ke lokasi panen, nah ini mohon untuk anggaran 2021 bisa lebih menjadi perhatian terutama di kabupaten kami. Terima kasih Pak Menteri, mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Pak Menteri ingetin saja kenapa saya tadi ngomong itu?coba kita lihat deh di areal sawah yang terbentang itu. Petani tempat berteduh saja tidak punya, itu saung-saungnya itu saung musiman 5 tahun sekali, itu ditutupin sama itu spanduk bekas Pilkada Pileg, bagaimana kita mau memuliakan petani?nah saya lebih cenderung bapak, mereka dimuliakan nanti ada hitungannya setiap sekian ratus hektar sawah itu harus ada 1 saung terbuka untuk mereka bertemu. Mereka ngiuhan selama kepanasan apalagi kalau disiapkan fasilitasnya disitu tempat mereka sholat. Saya pikir ini kemuliaan dilakukan dan petani itu pokoknya orang yang tidak muliakan selama ini tetapi selalu menjadi penolong setiap krisis dan seringkali kita ini selalu abai pada orang yang ikhlas dan selalu memperhatikan orang yang selalu ngomong dan rajin bicara dan yang terakhir dari seluruh rangkaian ini, kita berharap tetap punya rizki dalam hidup ini dan dipersilakan Rizki nya jangan bulan April saja karena kita berharap panennya setahun 3 kali terima kasih.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Aamiin ya Allah.

Terima kasih Pimpinan. Sebenarnya saya hari ini tidak, jujur saya dapat bahan dari hari apa ya?saya dapat bahan dan saya hari ini sebenarnya tidak mau buka bahannya.

Bapak-bapak Dirjen yang saya sayangi,  
Pak Menteri yang saya cintai dan seluruh direktur.

Saya disini melihat tadi Pak Johan bilang kita sudah RDP, betul ya Bang Johan ya? ini ada Bang TA juga, kita sudah bersepakat, berkomitmen tapi ingat pak ini bersepakat ini atas nama Komisi IV bukan orang perorang loh pak ya? dan iya harus konsisten. Maaf Pak Momon mohon maaf forum Pimpinan yang terhormat termasuk kalau Pimpinannya juga ada yang main sendiri juga saya juga nggak setuju. Saya berbicara disini sesuai dengan komitmen pimpinan dari awal tidak ada warna tetapi cuma ada 1 kata disini Fraksi Komisi IV. Jangan merasa oh tenang aja udah aman, udah urusan sama si A, udah urusan sama si B, saya nggak ada kepentingan pak di sini. Saya Sarjana Hukum pak, memang saya nggak ngerti ya urusan insinyur-insinyuran, bapak-bapak lebih hebat seperti saya pernah bilang sama Pak Wandu, Bapak doktor pertanggungjawaban keilmuan bapak yang Bapak pertanggungjawabkan untuk rakyat Indonesia hari ini.

Saya mohon maaf, contoh saja ini saya baru lihat masalah *Food Estate* lagi di halaman 22 ini saya baru lihat. PUPR itu ada penyiapan SID tapi di halaman 23 ada lagi SID-nya sama Kementan, jadi gimana nih?itu yah. Saya mah nggak perlu lihat

banyak-banyak pak, emang saya nggak tahu PKH tiba-tiba ada anggaran muncul? tahu saya, mata saya itu kalau lihat angka jeli pak. Bapak bicara 1.000 desa ternak, bentar lagi mau muncul lagi Desa 1.000 Walet dan itu hanya untuk apa? *visibility studies* dulu, seolah-olah barang udah ada. Saya disini menghargai Pimpinan kalau mau bicara, saya duduk di sini atas nama konstituen saya.

Saya didorong oleh fraksi untuk berbicara, kami mendukung program Pemerintah tapi mbok ya realistis. Dari awal saya bilang tadi realistis, tadi yang ditanya oleh Pimpinan ini udah bulan apa Pak Menteri? apa kita ini emang negara hobi sulap-sulap gitu loh? prok o prok katanya tumbuh padi, memang ada lagunya tapi namanya juga lagu. Tadi bapak berbicara juga Menhan ubi kita beda tapi buntut buntutnya 1.000 Desa Ternak melibatkan lagi Menhan, ini bagaimana? konsisten pak. Ini saya juga minta sama Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat di Komisi IV konsisten antara ucapan anda hari ini didengar. Kalau saya sih jujur kalau manusia saya nggak takut pak tapi lebih takut sama Tuhan dan saya punya anak 4, karma itu ada pak. Saya jujur saya itu kesel bukan main hari ini, lagi-lagi begini. Pak Menteri kemarin mungkin monitor atau tidak? saya bilang pak, Dirjen-Dirjen bapak, sekjen ini bobroknya bukan main, tidak ada koordinasi. Main sendiri-sendiri coba aja.

Kemudian BPPSDM, terima kasih memang saya yang meminta data wirausahawan muda dari 1.436 kelompok didata ini apakah ini sampling pak? ada 64 kelompok. Saya akan minta tingkat, bapak simpel aja pak nggak usah sampai berkertas-kertas kayak begini sama saya. Jumlah 1.436 kelompok berapa yang berhasil? sudah dibantu kan begitu pak. Saya yakin nih bapak-bapak kalau dokter-dokter ini kan metodenya jelas pak kualitatif atau kuantitatif kan begitu? nah yang saya minta ini grafik, belum saya minta nih alsintan yang kemarin dihambur-hamburkan itu mana pertanggungjawabannya Pak Edhy? saya itu setiap reses turun itu saya selalu bilang, "andaikan negara ini bisa fokus, nggak ada masalah petani loh, nggak ada pak.

Saya sebenarnya ngomong ini saja sudah gemeter pak, karena saya emosinya bukan main sebenarnya tapi sudahlah ya mau digimanain lagi, udah nasib udah diantar duduk sama konstituen. Saya harap kita semua disini berkomitmen bersama-sama gitu loh. Saya mohon ini udah setahun, hampir setahun? hampir setahun begini terus pak. Saya bukan tipe orang hobi yang berdebat, berargumen. saya nggak. Bapak Menteri ngomong orang lapangan, saya lebih hidup di lapangan pak sebenarnya daripada duduk di tempat asik ya begini, balik kerokan masuk angin. Saya orang kampung pak, nggak kuat saya sama AC, tolonglah kita di sini bermitra bapak-bapak ku yang tersayang. Kami ini kerja bukan buat kepentingan kami tapi kepentingan kalau minjam bahasanya teman-teman dari Fraksi PKS itu kepentingan umat, masyarakat konstituen, walaupun ada mungkin segelintir orang ngapain sih ki masih mikirin dapil? emang lu bisa duduk kalau nggak ada dapil? kan logikanya kayak begitu. Bapak juga Pak Menteri merasakan jadi gubernur, apa bapak bisa jadi gubernur kalau tidak dipilih oleh masyarakat? kan begitu pak.

Jadi saya mohon dengan sangat, tolong komitmen ini dipegang pak. Saya nggak akan baca ini sampai clear Pimpinan kalau ditanya hari ini dengan kondisi hari ini. Tadi saya sudah ngomong keras sama teman-teman udah 80%, kembalikan

aja anggaran kenegara, sisain aja 20% bisa jalan kok, itu aja, saya hanya mengingatkan. Udahlah 1.000 Desa ternak, 1.000 Desa Walet apalagi, apalagi nanti 1.000 desa apa? Itulah Pak Nasrullah. Iya saya bukan tidak percaya, bukan tapi fokus pak jangan main proyek terus, iya. *Food Estate* jangan sampai diambil dari anggaran PSP terus nanti BPTUHPT Kalsel yang geser anggarannya. Pak Momon bingung dapat informasi dari mana Bu Kiki?teman saya banyak pak, itu aja. Jadi tolonglah sekali lagi, saya minta jujur. Saya hargai Pak Sarwo Edhy kemarin jujur, terima kasih pak. Saya suka orang jujur, sekali di bohongi saya tidak akan pernah percaya seumur hidup saya dan saya yakin semua teman-teman kayak begitu. Saya akhiri.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Mbak Kiki.

*Insya Allah* rezekinya mengalir terus sesuai dengan namanya dan kelebihan Mbak Kiki ini detil hafal angka pak, mutasi angka dia tahu apalagi mutasi orang. Mungkin dia detil apa saja, saya enggak bisa pahami itu. Dari sini mutasi ke sini angkanya nol komanya sekian. Nah kemudian ini yang 1.000 desa ini mana berhasil atau tidak? ya kita harus mengkoreksi secara bersama. Memang seringkali kerangka berpikir kita ini hanya kerangka berpikir menyerap anggaran. Nah nanti kita mari sama-sama rubah kerangka berpikirnya bukan menyerap anggaran tapi kerangka berpikirnya adalah melahirkan sesuatu yang memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat banyak terutama bagi peningkatan produksi di sektor pertanian dalam arti luas.

Saya pikir angka kritisnya beda karena kalau Mbak Kiki agak detil kemudian agak sedikit menekan karena mungkin karena tinggal di Jakarta jarang ditekan di Sulawesinya, nah kemudian karena latar belakangnya pengacara sangat luar biasa sih. Ini paling pintar di antara anak muda yang ada di sini dan rizkinya paling bagus, Nah selanjutnya ada yang tertinggal nih dari temen-temen Fraksi PAN, Pak Khaerudin. Saya nggak tahu apa yang diusulkan; apakah ingin nambah alsintan, jalan ke sawah atau kemudian embung?embung itu Orang Sunda artinya nggak mau. Rupanya dia pengen Bung, jadinya ga mau. Makasih.

#### **F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Terima kasih Pak Dedi, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Sampurasun* Kang Dedi,

Pimpinan yang saya hormati,  
Anggota yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta seluruh jajaran Eselon 1 juga yang saya hormati dan tamu-tamu undangan, kalau yang ada saya juga hormati.

Ada hal yang ingin saya sampaikan beberapa hal Pak Menteri, pertama Jumlah desa di kita itu emang 83.000 lebih, jadi kalau kita menyebut 1.000 desa itu jadi kasihan nanti ada yang cemburu, (02:02:44) jadi dedikasinya kita tidak tepat. Jadi orang perang-perang itu 80.000 desa yang disebut 1.000 desa, emang kalau buat saya gak usah terpancing sama judul Pak Nasrullah, niat baik itu bisa jadi baik tapi tersampaikan dengan bahasa yang seolah-olah hebat tapi kenyataan itu bahasanya tidak tepat, kenapa 80.000 desa kok disebut 1.000 desa? nanti orang pada mikir waduh, waduh banyak yang nggak kebagian pasti. Nah kira-kira dan tentu tidak semua kebagian pasti, tapi kan kalau di sebut itu tidak jadi baik.

**KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pak Khaerudin tolong fokus aja, nggak usah kesana, kesini. Langsung fokus saja apa yang mau ditanyakan.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):**

Itu yang pertama jadi saya pikir penyebutan itu untuk dikoreksi, yang kedua selesai pembicaraan dari rapat yang lalu, kita *concern* kepada tapi yang lain sudah di sampaikan oleh teman-teman adalah bagaimana bukan menghidupkan tapi bersinergi dengan anak-anak pertanian, lembaga-lembaga yang ada di pertanian; ada Sangeangsri, ada Berdikari bagaimana mereka juga bisa berdaya dan bersinergi. Tadi saya sampaikan ketemu Pak Menteri, bagaimana PTPN di Pulau Jawa punya lahan luas dan siap tanam bagaimana ditanam? dan betul dan tidak susah koordinasi karena sudah pernah kenal, sudah tapi kami ingin mendorong secara politik anggaran itu wajib ada untuk menghadapi masa depan sebentar lagi. Sekarang Jakarta PSBB tidak ada migrasi orang pak, jadi orang sudah di kampung semua artinya yang dipikirkan oleh Pak Menteri tadi tidak sempat mikir makan. Nah ini mendorong bagaimana mereka aman makannya itu. Terima kasih Pimpinan, terima kasih Pak Menteri.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam.*

Di luar dugaan Pak Ketua ternyata Pak Khaerudin nanyanya sangat singkat dan berujung di PSBB Jakarta ya terima kasih. Nah serangkaian pertanyaan yang representasi fraksi sudah selesai dan kita ada yang virtual, sudah. Nah yang virtual bagaimana? silakan Mbak Alin mau berbicara? *mangga*.

Sudah diatur? Baik Pak Ketua, baik siap, baik terima kasih. Kembali kepada tata tertib rapat dan yang menyampaikannya adalah 1 orang mewakili satu fraksi dan semua fraksi sudah menyampaikan pendapatnya kan? sarannya dan kritiknya dan selanjutnya dipersilahkan.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Saran Pimpinan, mungkin ini sudah jam 12.30 WIB.

**KETUA RAPAT:**

Atau kita sampai jam 13.00 WIB jawab dulu? Nanti jam 13.00 WIB kita skors.

**F-PG (ALIN MUS, S.H.):**

Kita rapat konsultasi dulu karena saya pikir inikan belum clear semua Pimpinan. Jadi kita break semua fraksi ada di sini untuk bisa berkonsultasi dulu dan lebih aman.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih, kita sepakat skors dulu?

**ANGGOTA:**

Sepakat Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya baik kita sepakati skors dulu sampai pukul 13.00 WIB cukup? sampai pukul 13.30 WIB? karena nanti kita ada pembicaraan pada waktu skors itu. Saya ucapkan terima kasih, dengan ini saya nyatakan DISKORS, langsung ... terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

*Sampurasun.*

**(RAPAT DISKORS JAM 12.30 WIB)**

**(SKORS DICABUT JAM 13.45 WIB)**

**F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):**

Saya pak.

**KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):**

Iya Bu Neng silakan 2 menit bu, jangan bicara Litbang lagi bu.

**F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):**

Ga, 2 menit pak. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Menteri adalah sebentar pak.

Terima kasih.

Pak Ketua yang saya hormati dan yang saya banggakan juga teman-teman, Pak Menteri yang saya banggakan dan juga para Eselon I.

Yang ingin saya tanyakan tentang nilai tukar petani pak dan NTUP Nilai Tukar Usaha Petani. Jadi Pak Menteri menyatakan bahwa ada kenaikan, itu bagus sekali, namun disisi lain kesejahteraan petani ini tidak meningkat. Jadi mohon penjelasan dari Pak Menteri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang peran perempuan pak. Jadi pertanian ini sebetulnya didukung seharusnya oleh perempuan. Tadi Pak Made Urip selalu cerita tentang bunga desa pak, nah saya sudah bikin 2 buku tentang peran perempuan terhadap kedaulatan pangan dan peran perempuan terhadap pembangunan ekonomi sektor mikro dipertanian. Nah ini mestinya ada Eselon I -nya dari perempuan pak, kok Pak Menteri belum menunjuk atau mengangkat dari perempuan?

Kemudian yang kedua tentang alsintan pak, itu perlu ada pelatihan-pelatihan dari Kementerian Pertanian terhadap kelompok-kelompok tani. Nah yang ketiga tentang hortikultura pak, jadi kami agak meragukan apakah dengan waktu yang 3 bulan ini bisa anggarannya terserap dengan baik? kemudian yang berikutnya tentang gula pak. Swasembada gula tahun 2020-2023 sebesar 137.387.170.000 kami minta datanya pak karena saya khawatir tadi tidak tercapai dan berapa anggaran yang dibutuhkan sehingga kita tidak perlu lagi impor gula?

Kemudian yang berikutnya adalah rencana kerja tahun 2021. Jadi mohon ada pengawalan teknologi karena banyak sekali alsintan yang digelontorkan oleh bapak dan dengan merek-merek yang aduhai pak, padahal kita punya Direktorat Alsintan. Jadi saya mohon ada pengawalan-pengawalan supaya para kelompok tani kita ini mengenal teknologi alsintan yang disebarluaskan. Demikian pak terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih selanjutnya Pak Sutrisno, silakan pak singkat pak.

**F-PDIP ( Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):**

Yang pertama terhadap kebijakan pak, tadi sudah disinggung dengan Bu Endang memang nilai tukar petani ada peningkatan, nilai tukar usaha pertanian juga peningkatan, ekspor ada peningkatan, persoalannya adalah di lapangan untuk pangan yang meningkat permintaannya hanya beras, jagung menurun permintaannya jadi harganya pun juga turun. Kemudian Ketua tadi sampaikan Holtikultura pun juga sampai juga membusuk di lapangan. Persoalannya adalah.

**KETUA RAPAT:**

Pak Sutrisno, saya minta tolong bapak fokus jangan bicara di lapangan, di wilayah mana yang terjadi pembusukan kemudian dibuang? biar langsung ditindaklanjuti oleh Dirjen nya, itu Pak Sutrisno.

**F-PDIP ( Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):**

Di wilayah Majalengka pak, minggu kemarin saya diundang sama petaninya. Kol juga membusuk, begitu juga tomat, begitu juga cabe mengering, nggak ada yang beli. Persoalannya adalah di dalam rencana kerja tahun 2021 kok tidak ada program bagaimana distribusi pemasaran itu? tidak dibiarkan. Petani memproduksi barang tapi juga tidak dibantu bagaimana pemasarannya, iya kalau memang Kementerian Pertanian masih bekerja sama dengan TNI. Kemarin juga dalam panen, panen bawang putih di Majalengka, Bupati tidak Diundang, saya juga tidak Diundang oleh Dirjen Hortikultura dan DANDIM sama DANRAF-nya untuk panen-panen percobaan bawang putihnya. Kalau memang masih ada suruh serap...didalam kawal ke pasar-pasar induk itu.

Kemudian yang kedua Pak Menteri masalah tadi Swasembada gula. itu ada program di tahun 2021 ini 20.900 hektar dengan benih 32,8 juta. Pertanyaan saya siapa ujung tombak yang akan melaksanakan program itu? kalau saya memahami pasti pada BUMN, pada PTPN. Ada 7 PTPN yang mengelola gula di negeri kita ini; 5 pada posisi merugi bahkan juga ekuitasnya pun juga di bawah 50% ;hanya dua yang menguntungkan itu di Jatim, itu.

Kemudian dari data yang ada, saya juga menghimpun itu justru jumlah produksinya; produksi dalam negeri itu dari PTPN hanya 869.802 ton. Sedangkan kemarin dilaporkan bahwa produksi dalam negeri 2,1 juta ton, ini bagaimana sebenarnya? menurut hemat saya, akan dibuang itu program itu, tidak akan pernah tercapai dalam kondisi lembaga PTPN kondisi keuangannya, kondisi manajemennya juga banyak hutangnya dan mohon untuk ditinjau kembali untuk program gula-gula di tahun 2021 yg tidak mungkin tercapai. Orang-orang konsentrasi-konsentrasi agar program itu menyentuh pada perbaikan ekonomi karena Kementerian Pertanian sangat diandalkan untuk tumbuhnya ekonomi. Persoalan bangsa ini sangat berat pak, di satu sisi menangani COVID; karakternya membatasi orang, ekonomi harus tumbuh dengan menggerakkan orang, ujung tombaknya adalah Kementerian Pertanian.

Kemudian yang ketiga yang harus sesungguhnya mengembangkan distribusi produksi adalah Badan Ketahanan Pangan. Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2013, salah satunya adalah bagaimana menjaga, menjaga harga? bukan hanya pemasokan-pemasokan barang saja tapi harganya pun juga dijaga, yang ada hanyalah bagaimana toko-toko tani. Mohon untuk distribusinya juga dipertimbangkan bagi petani bukan pada bandar. Yang terjadi sekarang bandar-bandar nya yang difasilitasi, tetapi petani tidak dapat apa-apa. Saya kira itu Pak Ketua yang penting yang ingin saya sampaikan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Pak Daniel Johan Pimpinan.

Pak Daniel Johan.



**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):**

Ketua, ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oke Pak Made silakan.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):**

Iya terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan, Pak Ketua yang saya hormati,  
Rekan-rekan Anggota Komisi IV baik secara fisik maupun juga virtual,  
Bapak Menteri, Eselon I Kementerian Pertanian yang saya hormati.

Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian yaitu kepada Dirjen Perkebunan yang telah banyak membantu Provinsi Bali karena dampak COVID-19 ini adalah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi ekonomi Bali karena terpukulnya di sektor pariwisata, maka itu teman-teman yang bekerja di perusahaan, banyak yang pulang kampung untuk kembali menekuni sektor pertanian dalam arti luas. Jadi banyak sekali Dirjen Perkebunan yang telah membantu kami di Bali terutama pengadaan bibit; baik itu bibit coklat maupun juga kopi, nah sehingga sub sektor perkebunan ini mulai menggeliat di Bali dan malahan produk perkebunan ini mendapatkan harga yang cukup bagus.

Demikian juga teman-teman di Dirjen Tanaman Pangan yang banyak membantu tentang padat karya dan sekaligus juga berkaitan dengan penanganan pasca panen. Di Bali sekarang ini panen gabah sudah mulai dilakukan oleh para petani kita sehingga banyak *power thresher*, demikian juga UPGD, RMU yang diberikan sehingga itu membantu teman-teman di Bali. Jadi yang kena PHK, yang kena pemutusan hubungan kerja kemudian kehilangan pekerjaan ini dibantu sekali.

Demikian juga kepada PSP, alsintan sudah mulai di kita distribusikan kepada petani kita yang di Bali sehingga sangat membantu kondisi ekonomi Bali yang pertumbuhan ekonomi Bali hampir minus 12% karena terhantamnya sektor pariwisata. Jadi sektor pertanian ini sangat membantu dan malahan menjadi dewa penyelamat terhadap kondisi ekonomi Bali pada masa sekarang ini. Jadi saya berharap kepada teman-teman Kementerian Pertanian tidak jemu-jemu untuk membantu perekonomian Bali yang sedang dihantam di sektor pariwisata pada saat sekarang ini. Jadi terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian khususnya Dirjen BUN, Dirjen Tanaman Pangan kemudian PSP, syarat juga teman-teman di Holtikultura membantu para petani Bali yang sedang menghadapi kelesuhan ekonomi pada saat sekarang ini. Jadi terima kasih Pak Ketua, demikian juga Pak Menteri matursembah nuwun, dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya.

**KETUA RAPAT:**

Yang virtual ada lagi? Pak Daniel Johan jadi ngomong? Yang lain? Pak Salim?

**WAKIL KETUA KOMISI IV/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):**

Jadi Pimpinan izin.

**KETUA RAPAT:**

Kalau sedikit ga usah ngomong, yang kalau mau ngomong yang banyak.

**WAKIL KETUA KOMISI IV/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):**

Iya Pak Ketua, halo?

**KETUA RAPAT:**

Iya Pak Daniel jelas ga? kalau Pak Daniel enggak jelas datang supaya lebih jelas.

**WAKIL KETUA KOMISI IV/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Silakan Pak Daniel, kalau nggak, saya ngomong.

**WAKIL KETUA KOMISI IV/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):**

Iya makasih, makasih sebentar aja kok.

Pak Ketua, Pimpinan segenap Anggota yang kita hormati,  
Pak Menteri dan seluruh jajaran.

Ada beberapa yang penting kita sampaikan, yang pertama adalah kita minta penjelasan mengenai program perluasan areal tanam baru Pak Menteri yang sebenarnya kami sempat agak terkejut karena ternyata ini bagian dari penambahan program sekitar 1 triliun lebih, yang kami dapat tahunya belakangan dan menjadi pertanyaan, kenapa tidak dikabarkan dan tidak dikonsultasikan dengan Komisi IV? apa memang kementerian sudah tidak membutuhkan lagi Komisi IV pak? karena kita ingin tahu jumlahnya cukup besar itu sekitar, mungkin hampir 250.000 hektar. Jadi bagaimana, sejauh mana kesiapan nya? apakah lahannya sudah ada semua? apakah sudah ada CPCL-nya? siapa penggarapnya? sehingga sudah jauh mana berjalan? sehingga kami ingin memastikan bahwa program ini bisa berjalan sepanjang dengan baik sampai akhir tahun karena ini sudah dibulan Agustus, di bulan akhir. Nah selanjutnya juga kami mohon sebenarnya kami berharap kalau ada penambahan anggaran itu bisa lebih di alokasikan ke hal-hal yang efektif, yang bisa benar-benar membantu masyarakat secara langsung seperti yang menyangkut seperti UPO dan Perkarangan Lestari. Saya rasa sementara itu saja Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Pimpinan yang satu lagi Pak Hasan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Terima kasih Ketua.

Yang pertama Pak Mentan, saya ingin ada penegasan kenaikan anggaran di Kementan itu kan cukup signifikanlah dari dibawah 20 menjadi di atas 20 triliun. Saya ingin ada penegasan dari Pak Menteri langsung sampai sejauh mana kenaikannya itu keberpihakannya kepada rakyat miskin dalam hal ini pupuk subsidi? apakah ada tambahan?itu yang pertama.

Yang kedua Pasar Tani, Pasar Tani ini ndak nya betul-betul ada kajian yang strategis bagaimana dibangun dan langsung dimanfaatkan oleh para petani yang sebenarnya untuk bertemunya antara petani dengan tengkulak sehingga tatap muka langsung di pasar itu, jangan sampai seperti program Gubernur Jawa Timur sebelumnya lah yang gagal di Jawa Timur karena letaknya tidak berdekatan dengan petani.

Yang ketiga Pak Kementan ini tugasnya mensejahterakan petani, saya berharap 1.000 sapi untuk tentara ini, ini visi Presiden atau visinya Pak Menteri? coba Pak Menteri saya sangat tidak setuju karena tentara itu sudah punya gaji kalau rakyat itu butuh disentuh apalagi hari ini sekali lagi Pak Menteri tangan Pemerintah itu wajib hadir di tengah-tengah masyarakat petani. Kementerian Petani dibangun, dibentuk untuk mensejahterakan petani bukan mensejahterakan tentara atau polisi yang sudah mendapatkan gaji setiap bulan dari rakyat untuk penyelenggara negara. Tiga hal itulah barangkali Pak Ketua, tidak panjang 2 menit *insya Allah*. Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Iya *insya Allah* nanti kalau Pak Menterinya mau dan sempat akan di balas omongannya atau diinfokan.

Pak Hermanto mau ngomong?iya saya tahu karena bapak sudah lirik-lirik saya.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Kesempatan bagus Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Pak Ketua, Anggota Komisi IV, Pak Menteri bersama jajarannya.

Pertama saya menyampaikan apresiasi ya Pak Menteri, Kementeriannya mendapatkan WTP karena sukses dalam memimpin kementerian. Kemudian yang kedua sampai sekarang ini petani itu masih berteriak dan menangis kekurangan pupuk Pak Menteri. Saya ingin minta betul-betul segera dipenuhi karena ini adalah menyangkut persoalan tingkat produktivitas pertanian kita. Kalau ini tidak dipenuhi saya pikir target Pak Menteri bisa gagal, ini menyangkut kedaulatan pangan.

Kemudian yang kedua saya minta juga supaya Pak Menteri mengklasifikasi program-program ini mana yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan jangka pendeknya terkait dengan bulan atau bulanan karena ini kita akan menghadapi suasana pandemik yang masih belum tuntas. Jadi tanaman-tanaman dalam jangka waktu bulanan yang bisa dipanen dan bisa dikonsumsi, ini segera diprioritaskan. Nah ini karena ini kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemik tapi kan jelas arahan Presiden ini kan kita menghadapi dua hal sekarang ini, yakni : Pandemi dan Situasi Krisis Ekonomi. Kita lebih mendahului kegiatan pertanian ini pada tanaman yang bisa dihasilkan dalam jangka waktu pendek, itu berdampak dua hal tadi itu yaitu bisa menahan apa memperkuat antibodi kita dan juga bisa menumbuhkan perekonomian di sektor pertanian.

Kemudian yang ketiga, saya minta juga dari seluruh program yang berbasis masyarakat ini, ini juga segera sesuai dengan jadwal dan waktunya bisa direalisasikan karena ini adalah kebutuhan dari masyarakat terkait dengan soal kita mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. Kemudian ini ada aspirasi Pak Menteri dari BPTP Sukarami Kabupaten Solok, selama ini Badan ini bekerja secara optimal tapi akibat karena kekurangan anggaran sehingga terjadi pengangguran lahan 70% tingkat penganggurannya. BPPT Sukarami Kabupaten Solok, ini aspirasi Kepala Balainya, mungkin yang Litbang taulah. Nah ini dia pesan sekali itu bawang yang tadinya bisa bibitnya itu 40 an kilo, sekarang cuman hanya 1 kilo artinya ini dampaknya akan kemana-mana, sebentar ini mohon di perhatikan termasuk juga ayam KUB. Nah ini permohonan dari balai juga, ini saya menyampaikan aspirasi karena sebagai Anggota Dewan itu disumpah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Demikian Pak Ketua.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Tadi Pak Hermanto mengatakan Kepala Litbangnya pasti tahu, belum tentu tahu pak. Orang di Bogor aja saya kasih tanya ada kantor yang namanya Litbang aja udah nggak jelas jadi apa. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi pertanyaan-pertanyaan dari Anggota sudah dijawab. Jadi silakan untuk menjawab atau Eselon I yang akan menjawab, sebelum dilanjutkan saya ingin bertanya sama Pak Menteri. Ini ada Pertani, ada SHS kira-kira mau diapain ini? ya nanti dijawab. Kemudian tadi waktu makan siang, saya bicara sama menteri perihal penambahan kuota pupuk subsidi sebesar 3,1 triliun, apakah suratnya sudah dibuat atau belum ke Kementerian

Keuangan? karena bapak, ibu mohon maaf kalau ada kelangkaan pupuk yang disalahin Menteri, kalau enggak itu Pabrik Pupuk yang nggak bener. Padahal di gudangnya banyak tapi duitnya nggak ada, belum dibayar Pemerintah maka belum dijalankan.

Silakan dijawab.

**MENTERI PERTANIAN:**

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV yang saya sama hormati, yang saya muliakan.

Bapak Ibu sekalian dari kami Bapak Ketua dan para Anggota Komisi IV, sebenarnya kami mencatat dengan serius, apa-apa yang menjadi arahan, apa-apa yang menjadi petunjuk bahkan koreksi-koreksi dari implementasi di lapangan sehingga kami tinggal menyesuaikan dari nanti kesimpulan yang ada. Oleh karena itu tidak ada jawab menjawab lagi dari kami dan Eselon II, Eselon I. Yang ada adalah kita coba lakukan sesuai apa yang ada dan memang saya berharap asistensi kami tidak hanya di ruangan ini bapak, Kita di lapangan aja apa-apa dan seperti tadi yang Ketua arahkan. Sebutkan di mana desanya? di mana kecamatannya, kabupaten apa? Case-nya apa gitu? supaya kami langsung bisa menyikapi sesuai dengan kondisi yang ada, itu yang pertama pak.

Yang kedua masalah pupuk seperti Pak Ketua sudah sampaikan, kami mendapat penambahkan 3,1 dan itu akan segera kita distribusi kembali. Saya kembali dari perjalanan 6 provinsi dalam satu bulan ini dan 6 provinsi termasuk mengecek ketersediaan pupuk kita.

**KETUA RAPAT:**

Izin suratnya sudah keluar belum? Surat persetujuan?

**MENTERI PERTANIAN:**

Sudah, akan sampai kesana pak. Jadi sudah keluar.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tinggal action saja?

**MENTERI PERTANIAN:**

Jadi tinggal kita susun yang mana? karena begini pak, apa yang kita temukan di lapangan rata-rata untuk MP1 masih 80%, masih ada yang tersisa. Jadi berarti distribusi yang belum jalan. Yang kedua dan ini sementara di klarifikasi, kemudian kita kan masuk yang mana-mana daerah ya memang bersoal persis dengan kondisi itu, karena ini kan juga membutuhkan klarifikasi dinas teknis yang ada di Kabupaten dan provinsi yang bersangkutan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar.

Teman-teman Komisi IV yang saya hormati.

Tadi Menteri sudah mengatakan wilayah-wilayah mana saja apabila di Dapil teman-teman Anggota, ada yang melaporkan secara riil dan nyata jangan cuma omong saja. Di kecamatan ini, kabupaten ini kekurangan pupuk silakan nanti Wa kepada Dirjen TP dikecam.. PSP bahwa di kecamatan ini Kabupaten ini kekurangan pupuk. Jadi tugasnya kita saling membantu, ya.

**F-PD (Hj. NUR'AENI , S.Sos., M.Si.):**

Intrupsi Pak Ketua boleh?

Kaitan pupuk tadi, menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Menteri dapil Kabupaten Serang, disaat kita melakukan kunjungan Komisi IV ke sana itu benar-benar langka Pak Menteri. Mohon ini seperti apa yang harus kita sampaikan? jangan sampai begini Kabupaten Serang Kecamatan Pontang, Pak Dirjen Tanaman Pangan yang mendampingi. Jadi ini bukan mengada-ngada tapi reall memang kondisi kelangkaan pupuk jangankan daerah yang lain yang jauh, kita Banten yang dekat dengan ibu kota negara saja masih kekurangan bahkan langka pupuk ini. Jadi jangan sampai nanti saat saya turun ini dipertanyakan oleh petani di sana, itu Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Tadi sudah saya jelaskan, kalau sempet hari ini tulis kecamatan, kabupaten nya langsung serahkan kepada Dirjen TP, kalau dia nggak tidak lanjutin ya kita usulkan untuk di ganti aja, diberhentikan itu aja. Berarti dia nggak ada gunanya sebagai Dirjen karena tadi Pak Menteri mengatakan Pak Menteri sudah turun kesekian daerah, provinsi cukup capek. Nah mungkin Pak Menteri atau TP nya belum ke Banten. Kita kasih masukan, kita kasih masukan wa-nya atau cek nomor teleponnya atau alamat yang detil, ini ke kecamatannya ini Kabupaten ini-ini itu loh. Itu aja nanti kan yang bersangkutan tinggal memerintahkan Eselon II atau Eselon III nya.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Izin Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Apalagi Pak Hermanto?masalah pupuk lagi.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

½ menit saja. Jadi berdasarkan laporan.

**KETUA RAPAT:**

Cukup kalau ½ menit cukup?

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Cukup jangan disela.

Berdasarkan laporan perkembangan pupuk yang sekarang ini sampai September itu di atas 85% itu tidak dipertahankan kemudian yang di bawah 85% juga sudah....tetapi dari itu saya lihat Sumatra Barat tidak termasuk didalam diatas 85 %. Nah ini berarti masih kurang dibawah 85 % dan itu ada berapa porsi yang lain karena yang tercantum di sini adalah baru 9 provinsi yang di atas 85%, nah itu pupuk urea, yang lain seperti itu pola laporan ini. Saya minta ini juga menjadi pencermatan kita Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Hermanto, Pak Hermanto urus dapil Pak Hermanto, yang provinsi lain gak usah diurusin itu saja. Jadi supaya fokus, per fokus bahwa Hermanto, Hermanto anggota dewan yang paling baik sampai masalah pupuk pun diurusin. Satu lagi saya harus bicara dengan Pak Sarwo Edi atau dengan Dirut Holding Pupuk. Saya dapat info dari Lampung kalau urea itu di Lampung sebagian hampir 60% itu dari Pusri selebihnya dari Kujang dan dari mana? berapa biaya ongkos angkut nya? kenapa nggak dari Pusri aja yang lebih cepat? saya minta tolong dijawab entah Pak Dirjen, entah Dirut Holding, itu aja.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik Pak Ketua.

Terima kasih kaitan dengan perwilayahan itu di atur oleh Pupuk Indonesia Holding. Pak Bakir mungkin silakan pak.

**KETUA RAPAT:**

Pak Bakir tolong dijawab, jadi kalau dari Kujang ke Lampung ongkosnya lebih mahal atau dari Palembang jalan tol 3 jam lebih murah.

**DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (ACHMAD BAKIR PASAMAN):**

Pak Ketua terima kasih.

Baiklah berdasarkan data yang kami punya pak bahwa disini bahwa untuk di Lampung memang dari PUSRI pak.

**KETUA RAPAT:**

Full 100%?

**DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:**

Untuk Urea pak ya.

**KETUA RAPAT:**

Iya Pak Suhardi Duka.

Cukup Pak Subagyo?

**DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:**

Untuk Jawa Tengah juga dari Pusri, cukup pak matikan mikrofonnya.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Makasih Pak Ketua, saya ingin bertanya kepada Direktur Pupuk, saya minta jujur menjawab pak, apakah kualitas pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi itu sama atau tidak? Jujur jawab secara jujur pak.

**DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:**

Sepengetahuan saya sama pak.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Bapak siap uji dilab?

**DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:**

Siap.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Siap pak, nanti kita uji dilab Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ini perintah saya sebagai Ketua Komisi IV, iya segera mungkin uji lab, di tempat pengujian lab baik Sukofindo, ITB maupun yang lain-lain. Dibawa contoh pupuk ke sini, kira-kira 5 kilo beserta komponennya apa?iya saya minta nanti Rapat Kerja yang akan datang supaya dibawa ya?terima kasih.

Silakan Pak Menteri dilanjutkan.

**MENTERI PERTANIAN:**

Iya jadi ketersediaan pupuk kelihatannya dari 6 provinsi menjadi sampel kami, cukup bapak dengan memang, memang mungkin distribusi sampel ini 5 yang



memang kita harus benahi, satu. Kalau masalah pupuk setiap tahun pasti ada yang kekurangan, karena begini dari RDK yang masuk itu 22 juta permintaan, kemudian dari hasil seleksi Kementerian Pertanian itu 12 juta bapak tetapi yang kemudian yang disetujui kemarin cuma 7 juta. Ini ada tambahan 3,1 triliun untuk tambahan menjadi 9 juta kurang lebih ya. Iya 9 juta totalnya.

**KETUA RAPAT:**

Ekuivalen penambahannya 1 juta lebih ya?

**MENTERI PERTANIAN:**

Iya kurang lebih begitu, ya. Jadi oleh karena itu pasti saja ada yang langka pasti pak. Oleh karena itu mendistribusi ini bukan hal yang mudah di lapangan tetapi kan ini pertanggungjawabannya ada di lini 4 itu di kabupaten, di lini 5 itu ada yang di di kecamatan di Ejen. Oleh karena itu yang terus kita cek dan kalau ada kelangkaan seperti kemarin bilang ada kelangkaan, kami turun ternyata enggak bapak. Jadi ada modus-modus juga seperti ini tetapi itu tadi kalau memang ada kelangkaan yang seperti tadi Ketua sudah sampaikan saya kira itu, di mana tempatnya? kecamatan apa? kita turunkan tim untuk menangani secara langsung di lapangan, itu yang pertama.

Yang kedua saya kira ada beberapa catatan-catatan dari tanggapan Anggota Komisi tadi yang satu hal yang saya ingin sampaikan 1.000 desa untuk bibit untuk apa daging kerjasama dengan TNI tidak ada. TNI mendampingi secara keseluruhan dalam rangka ikut membantu keamanan dan distribusi dan lain-lain, tidak ada kerjasama secara teknis yang memberikan TNI di sana, termasuk di Humbang itu TNI hanya diperbantukan untuk mendampingi rakyat dalam rangka VOT dan lain sebagainya. Jadi secara khusus tidak, tidak, tetap kerakyat, intinya tetap kerakyat. Saya kira kurang lebih itu, izin Ketua kalau mungkin Eselon I juga dia perlu menjawab secara detail, kami sudah mencatat dan kami tetap mohon di asistensi karena hasil kesimpulan itu yang harus kami kawal sepenuhnya. Kami kembalikan kurang lebih, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi kalau tadi masalah sapi bukan TNI nya, tadi siapa yang nanya? Pak Hasan tadi mau nanya bagaimana mekanisme kalau dia mau minta untuk rakyatnya?

**WAKIL KETUA KOMISI IV/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Antara tentara dengan rakyat pak, minta ketegasan, jadi jangan ada isu lagi ini.

**KETUA RAPAT:**

Jadi kira-kira Saudara Menteri apakah Anggota Komisi 4 kira-kira ini, saya bukan menekan, saya bukan tukang minta-minta. Saya minta diam dulu Mbak Lulu

kalau lagi ngomong, kira-kira apakah aspirasi Teman-teman Komisi IV bisa mendapatkan kalau bisa mekanismenya bagaimana? kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, itu aja, iya itu yang penting.

Masalah tadi Kabupaten Humbang Hasundutan, tolong, tolong ditinjau ulang perihal 30.000 untuk tanaman kentang, bawang putih dan bawang merah karena otomatis kalau di atas permukaan laut 900 M atau 1.000 M dipermukaan laut, pasti perbukitan. Ini yang kami khawatirkan terjadi longsor, maka saya juga minta Kepala Balai dari Kementerian Kehutanan untuk meninjau ulang, mengecek ulang kira-kira dari 30.000 usulan Pemerintah berapa banyak yang bisa digunakan untuk bawang putih, kentang, dan bawang merah? karena kemarin waktu RDP sama Kementerian Kehutanan saya bilang kalau 30.000 hektar sampai terjadi longsor yang kena tuh kamu Kehutanan bukannya Menteri Pertanian. Iya jadi besok, eh nanti akan kami tanyakan lagi nanti jam pukul 16.00 WIB ini, kami masih ada Rapat Kerja sama Kementerian Kehutanan, jelas ya Pak Menteri? dari diskusi saran dan masukan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Republik Indonesia, sebelum acara ini kami akhiri, kami akan bacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini:

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengapresiasi terhadap realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 sebesar Rp8.496.250.929.535,00 (delapan triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atau 60,43% dari anggaran sebesar Rp14.059.850.245.000,00 (empat belas triliun lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerjanya dan menjadi bahan evaluasi terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan di tahun berikutnya.

Anggota? Pemerintah?

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam RKKL tahun 2021 sebesar Rp21.838.977.027.000 (dua puluh satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan komposisi per Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretaris Jenderal**, sebesar Rp1.710.390.449.000,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp164.581.000.831.000,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Saudara Inspektorat Jenderal anda sudah dapat tambahan yang cukup lumayan, apa yang pernah dijanjikan di dalam RDP harus dilaksanakan, janji membongkar kasus ini, kasus ini, kasus ini, iya ga?

**Plt. INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Siap Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

- c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp4.914.936.274.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jendral Holtikultura**, sebesar Rp1.142.206.411.000,00 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.611.640.697.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp2.132.854.524.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Direktorat Jenderal PKH, anda harus pikirkan:

1. Bagaimana peningkatan produksi peternakan?
2. Bikin regulasi perunggasan, kalau emang harus di cutting DOC-nya di cutting, kalau memang gpps-nya harus di stop, stop agar supaya petani peternak kecil hidup karena saat ini harganya sudah jatuh, kalau perlu bikin terobosan. Contoh ya di Kementerian Sosial kan ada PKH untuk membeli sembako, anda harus bikin terobosan misalnya mitranya PKH itu diberikan mesin *cold storage* yang kecil jadi disuplai oleh peternak kecil ayam potong. Kan selama ini paling ya dikasih sardencis, satu kaleng isinya ikannya segede gini, lebihnya kuahnya semua digantikan kalau perlu. Bikin coolstorage yang kecil cari yang efisien, bisa masuk ayam 50 ekor apa 100 ekor. Jadi waktu PKH itu anda wajib membeli daging, nanti saya laporkan ke Kementerian Sosial bikin jutlak dong setiap pembelian sembako wajib membeli ayam, ayamnya dari mana? iya kalau bisa dari peternak kecil, ya? itu mungkin salah satu terobosannya.

- g. **Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp5.271.517.719.000,00 (lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
- h. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp1.675.117.328.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

ini yang menjadi bahan sorotan teman-teman, nggak usah bikin bibit tomat lah, inilah, nggak usah. Seperti yang dari awal saya bilang, banyakin bikin bibit padi, jagung, udah kalau perlu yang perusahaan-perusahaan besar mau Santo atau apa, jangan masuk kamu, saya sudah bisa sendiri, itu yang saya inginkan.

- i. **Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp1.332.432.711.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- j. **Badan Ketahanan Pangan**, sebesar Rp776.001.246.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- k. **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.116.290.837.000,00 (satu triliun seratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas, berdasarkan kebutuhan petani dengan cakupan luas dan berdampak besar terhadap produksi pangan nasional,

Anggota?

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Saran saya agar semua Eselon I melihat anggarannya agar tidak berbeda atau memang kita sama-sama menyepakati anggaran yang sudah kita sampaikan. Cek dulu Ketua karena ada perbedaan, untuk memastikan aja Ketua dari atas.

**KETUA RAPAT:**

Turunin kebawah, terus, terus iya dilihat dari yang Nomor 2 halaman a, naikin pelan-pelan, pelan-pelan. Memang ibu Alin cerdas sekali, dia saking sayang dengan Eselon I padahal tadi udah lewat, udah dengar, diulang lagi.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Sama Dirjen Pupuk, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Bukan dia paling sayang dengan Direktur Pupuk kayaknya ga datang, dia bilang ganteng kali, biasanya dia pakai yang orang Eropa, sekarang mau nyoba orang selatan. Sudah dilihat Eselon I? Menteri setuju?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju pak tidak ada masalah.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui pagu Dana Alokasi Khusus Kementerian Pertanian tahun 2021 sebesar Rp1.600.000.000.000,00 dengan rincian:
  - a. DAK fisik penugasan sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah);
    1. Provinsi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
    2. Kabupaten/Kota sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah).Selanjutnya anggaran DAK fisik penugasan akan ditujukan untuk pembangunan renovasi, sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan komoditas pertanian strategis agar memiliki daya saing baik untuk industri maupun ekspor.

Anggota?Pemerintah?

**ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:**

Setuju.

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju pak.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

Nah kira-kira ini, ini kira-kira kalau DAK Kabupaten 1,2 triliun, boleh nggak untuk memperbaiki BP3 atau BP4 di Kecamatan?ga yang di kecamatan BP3 apa BP4?oke boleh nggak dana ini dipakai untuk perbaikan Balai Penyuluhan di kecamatan? karena kita lihat kondisinya ya sudah amburadul, boleh?

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):**

Sebagian memang digunakan untuk BP3.

**KETUA RAPAT:**

Iya kalau gitu kalau boleh nanti dibuat Surat Edaran ke Bupati, Walikota. Iya, jangan nanti mereka buat seenak-enaknya iya? kan kasihan.

- b. DAK nonfisik sebesar Rp204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah) dialokasikan untuk Kabupaten kota selanjutnya anggaran DAK nonfisik yang ditujukan untuk peningkatan akses pangan masyarakat, peningkatan kemandirian pangan rumah tangga, penyampaian informasi pertanian melalui pendataan, pelatihan dan pendampingan.

Anggota, Pemerintah?

**ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:**

Setuju Ketua.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

4. Komisi IV belum dapat mendukung konsep pengembangan kawasan pangan melalui program *Food Estate* selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan melakukan pendalaman untuk membahas mengenai program *Food Estate* pada rapat berikutnya.

Jadi paling gak begini berikan kami data, berikan kami masukkan, setelah itu kami juga akan konsultasi kepada LHK termasuk juga Badan Restorasi Gambut karena kami tidak mau nanti terjadi masalah.

Anggota?

Pemerintah?

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Setuju Pak Ketua, semangat saya.

**KETUA RAPAT:**

Saya ini sebetulnya memasukkan *point* Nomor 5 perihal tadi yang 3,1 triliun tambahan pupuk untuk mengurangi kelangkaan pupuk. Bisa dibantu ininya? Ihsan eh lagi rapat kok, bisa dibantu nggak Nomor 5 ini kata-katanya?

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Bahasanya jangan meminta Ketua, mendesak saja Ketua karena inikan terjadi kelangkaan pupuk hari ini. Jadi mendesak Pemerintah untuk menjamin.

**KETUA RAPAT:**

Ini yang lebih bagus mengengjot ini.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS)**

Untuk menjamin tambahan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2020 senilai sekian, untuk disalurkan. segera dan tepat sasaran begini aja. Untuk mengantisipasi kemungkinan kelangkaan.

**KETUA RAPAT:**

Bukan ini suratnya sudah keluar Bos, suratnya sudah keluar, iya Pak Menteri ya?

**MENTERI PERTANIAN:**

Izin Ketua.

Jadi sesuai permintaan Kementerian Keuangan kami sudah menyurati untuk ini, jadi memang alokasinya sudah seperti itu dalam Ratas sudah disetujui oleh Bapak Wakil Presiden itu waktu mewakili sebuah Ratas khusus untuk pupuk. Surat permintaan itu kita sudah masukkan tetapi sampai sekarang ini di punya itu belum kami terima tapi informasinya tidak ada masalah pak, kurang lebihnya seperti itu. Kami sudah di, ini banyak yang belum tapi kami sudah diminta untuk jalan.

**KETUA RAPAT:**

Jalan dulu DIPA belakangan?

**MENTERI PERTANIAN:**

Oh tidak pak, maksud saya kita sudah, saya suruh ngecek semua pupuk di mana, pada lini 4, lini 3 itu kita udah siap. Jadi begitu DIPA-nya keluar, begitu selesaikan begitu pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya sebetulnya ini benar kalau mendesak.

**MENTERI PERTANIAN:**

Desak saja pak.

**KETUA RAPAT:**

Jangan mengengjot, jangan.

5. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak Pemerintah untuk menjamin tambahan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2020 senilai 3,1 triliun untuk disalurkan segera dan tepat sasaran ke daerah-daerah yang mengalami defisit/kelangkaan pupuk.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Senilai diganti sekitar Pak Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Iya lebih kurang aja, jangan lebih kurang begitu.

**F-PKS (Dr. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):**

Atau disebutin ketua 1 ton.

**KETUA RAPAT:**

Atau ga senilai plus minus, ga bisa? kalau 3,14 ntar rancu, detailin nolnya dibetulan. Anggota tolong dilihat, siapa yang memastikan 3.140.000.000.000 kalau dihapus?misalnya nanti tahu-tahu pupuknya cuman 3.139.700.000.000. Iya saya ulang.

- 5 Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak Pemerintah untuk menjamin tambahan alokasi anggaran pupuk subsidi tahun anggaran 2020 senilai lebih kurang  $\pm 3,140.000.000.000,00$  (tiga triliun seratus empat puluh miliar rupiah), untuk bisa disalurkan segera dan tepat sasaran ke daerah-daerah yang mengalami defisit/kelangkaan pupuk bersubsidi.

Anggota?

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Tanya Bu Luluk, tanya Bu Luluk Pak Ketua. Bu Luluk setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

Sebelum kami menutup Rapat Kerja hari ini kami persilakan Saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan kata penutupnya, silakan.

**MENTERI PERTANIAN:**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



Pimpinan dan Segenap Anggota Komisi IV,  
Sekjen dan segenap jajaran Kementerian Pertanian.

*Alhamdulillah wasyukurillah*, kami merasa sangat bersyukur Rapat Kerja ini bisa berlangsung dengan sangat baik bapak, dan kami merasa bahwa begitu banyak masukan yang kami bisa serap dari Raker ini, mulai dari RDP dan sebelumnya. Saya kira tadi banyak masukan yang walaupun tidak disampaikan tetapi tersirat begitu *care*-nya pada kami terutama pada saya sebagai Menteri untuk melindungi agar tidak salah. Saya janji pak untuk coba bekerja lebih baik lagi dari apa yang ada. Terima kasih atas segala perhatian dan kepedulian, ini menjadi sangat penting,

Terakhir permintaan kami juga didampingi dilapangan. Banyak hal-hal yang dilapangan memang kita harus selesaikan dilapangan termasuk *Food Estate* pak. Kami berharap kita suatu saat datang melihat bersama-sama, baru bisa memahami kondisi yang ada di Humbang itu berbukit-bukit kah atau datar kah? atau seperti apa yang ada di Kalteng? kedalaman lahan gambutnya seperti apa? yang kita sikapi, aloeveranya yang seperti begitu. Jadi seperti itu hanya bisa dengan juga dilapangan pengamatan lapangan. Minta maaf kalau kadang-kadang kami turun harus mendadak karena ini berkejaran dengan waktu yang ada. Kami punya waktu tinggal 4 bulan dan harus membuktikan sama Ketua dan para Pimpinan yang ada, Anggota Komisi IV, insya allah kami berhasil dengan konsepsi yang ada. Memang diminta 30.000, tidak semudah yang ada tetapi Kementerian Pertanian hanya bisa masuk setelah lahannya disiapkan. Jadi kami berpatokan disitu ,lahan harus siap, water management harus disiapkan oleh PUPR baru kami bisa masuk dan sudah seperti itu dan bahwa kami akan mendapat 1.000, 3.000 kah atau 10.000 itu akan menjadi evaluasi bagi kita, kami sudah siap dilapangan. Saya berharap boleh diklaim oleh siapa saja Menteri Pertanian, dan Kementerian Pertanian akan pasang tenda dilapangan bahwa kami bertanggung jawab, ini yang kami lakukan dan siap bertanggung jawab dihadapan Komisi IV apa yang ada. Terima kasih Pimpinan, mohon maaf saya sungguh merasa kali ini begitu dalam kepercayaan bapak sama kami semua dan *insya allah* kami akan jaga kepercayaan itu.

*Wabillahi taufiqhidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Tapi bagi Menteri yang paling penting ga sampai malam, biasanya kan sampai malam, ini ga sampai malam. Sebelum saya menutup ini, saya ingatkan Saudara Dirjen Holtkultura iya? anda sudah janji sama saya; pelaku-pelaku bawang putih yang konon bukan pemain bawang putih dan SPI nya belum diurus, belum keluar segera dicabut, segera laporkan kesaya. Karena ini terjadi jual beli antar pengusaha, Pengusaha b waktu mau beli bawang putih ga punya duit dijual ke c, c juga ke d. Segera evaluasi, minggu depan laporkan kesaya pencabutannya, iya? kemudian kita akan buat Panja Bawang Putih, juga para dirjen saya ingatkan Eselon II anda terlalu pinter main dilapangan, terlalu pinter main dilapangan. Kemarin saya telpon Wandu saya ingatkan, iya Wandu saya ingatkan anda kan? hati-hati, hati-hati dengan Eselon II anda. Oknum Eselon II, tidak semua Eselon II, Eselon III tidak baik, oknumnya pasti yang tidak baik, itu.

Terima kasih dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini atas nama Pimpinan yang sendirian maksudnya dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, ada kekhilafan dengan mengucapkan *alhamdulillah* Rapat Kerja hari ini kami tutup.

*Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.45 WIB)**

a.n. Ketua Rapt  
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy  
196508171988031002